

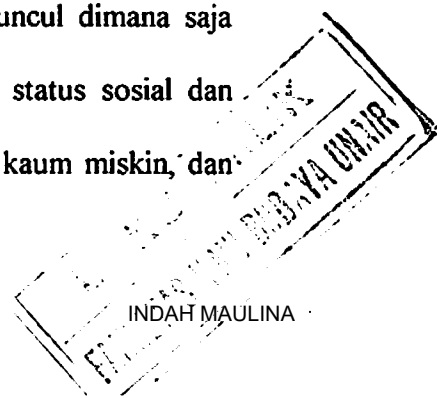
## BAB IV

### REALITAS KEHIDUPAN SOSIAL DALAM NOVEL *KREMIL*

Karya-karya Suparto Brata, hampir selalu menampilkan potret kehidupan. Potret kehidupan yang sering ditampilkan adalah potret kehidupan orang miskin yang sederhana dan tertindas. Melalui novel *Kremil* ini, misalnya, Brata mengemukakan berbagai permasalahan sosial, khususnya dalam kehidupan masyarakat di lingkungan lokalisasi *Kremil*. Novel *Kremil* ini juga banyak mengemukakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat pinggiran dalam menghadapi persaingan hidup yang semakin berat.

Jika dilihat dari banyaknya permasalahan sosial yang dikemukakan oleh Brata, novel *Kremil* ini merupakan reaksi Brata selaku pengarang setelah melihat bahwa berbagai masalah sosial dapat muncul dimana saja, di desa, kota, terlebih lagi di tempat pelacuran. Melalui novel *Kremil* ini tampaknya Brata ingin menunjukkan adanya sisi lain dari kehidupan yang tidak bisa dilihat oleh awam, yaitu kehidupan masyarakat bawah dengan masalah-masalah sosialnya.

Novel *Kremil* adalah salah satu wujud ekspresi pengarang dalam bentuk cerita fiksi yang ditulis berdasarkan realita dalam kehidupan masyarakat. Diangkatnya masalah-masalah sosial dalam novel ini adalah suatu respon pengarang dalam menghadapi berbagai situasi sosial di lingkungannya. Novel ini juga merupakan bukti bahwa masalah-masalah sosial dapat muncul dimana saja seiring dengan sejarah kehidupan manusia, tanpa memandang status sosial dan letak geografis. Masalah sosial dapat muncul dalam kehidupan kaum miskin, dan



dapat muncul dalam kehidupan mereka yang kaya. Masalah sosial dapat muncul dalam kehidupan masyarakat desa yang sederhana, dan juga dapat muncul dalam kehidupan kota yang maju dan modern meskipun bentuk dari masalah sosial yang dihadapi berbeda-beda.

Brata sebagai seorang pengarang sekaligus sebagai makhluk sosial mengemukakan berbagai pandangannya dalam mengatasi masalah sosial tersebut. Keinginan Brata untuk mewartakan berbagai problematika yang terjadi dalam kehidupan rakyat kecil tercermin melalui novel *Kremil* ini, yang berarti menunjukkan adanya fungsi karya sastra dalam masyarakat.

#### 4.1 Masalah-masalah Sosial

Masalah-masalah sosial selalu muncul dalam sejarah kehidupan manusia. Masalah sosial dapat juga muncul di mana saja dan kapan saja. Masalah sosial bisa saja terjadi di desa ataupun di kota besar seperti Surabaya. Melalui novel *Kremil* ini, dikemukakan persoalan yang muncul di kota besar khususnya dalam lingkungan prostitusi. Berbagai permasalahan seputar hidup bermunculan di kehidupan seperti ini.

Melalui cara bercerita yang khas, Brata mengangkat berbagai permasalahan sosial ke dalam karya fiksi. Meskipun demikian, cerita fiksi ini sangat relevan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. Masalah-masalah sosial ini juga banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang diangkat adalah masalah yang dihadapi oleh kaum pekerja seks pada khususnya dan rakyat kecil pada umumnya. Permasalahan ini merupakan masalah yang

kompleks dan bersifat nasional karena dialami oleh Bangsa Indonesia saat ini. Masalah-masalah ini akan diuraikan secara jelas pada sub bab berikut ini.

#### **4.1.1 Refleksi Kemiskinan dalam Novel *Kremil***

Kemiskinan tidak hanya terbatas pada suatu realitas atau keadaan objektif, mandiri, dan dapat dihitung dengan angka sebab kemiskinan tidak dapat diukur hanya dengan indikator penguasaan atau pemilikan materi. Pernyataan ini diperkuat oleh adanya ukuran garis kemiskinan yang tidak berlaku sama bagi semua masyarakat. Istilah kemiskinan selalu melekat dan begitu populer dalam masyarakat yang sedang berkembang. Istilah kategoritatif kemiskinan dapat dikategorikan sebagai berikut.

1. Kemiskinan absolut, yaitu miskin karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya untuk memelihara foisiknya agar dapat bekerja penuh dan efisien.
2. Kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang muncul jika kondisi seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan kondisi orang lain.
3. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan akibat struktur masyarakatnya yang tertimpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah.
4. Kemiskinan situasional atau kemiskinan natural, yaitu kemiskinan yang terjadi jika seseorang atau sekelompok orang tinggal di daerah-

daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya mereka menjadi miskin.

5. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang terjadi karena kultur masyarakatnya. Masyarakat rela dengan keadaan miskinnya karena diyakini sebagai upaya untuk membebaskan diri dari sifat serakah yang pada gilirannya akan membawa kepada ketamakan (Mardimin, 1996:19-24)

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang harus dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan sekitar duapuluh tujuh juta jiwa lebih, atau sekitar 18,2 persen dari seluruh penduduk Indonesia. (*Surabaya Post* 1992:5) Angka ini merupakan ancaman bagi Indonesia, mengingat Indonesia adalah bangsa dengan jumlah penduduk yang besar yang merupakan negara berkembang yang harus membenahi seluruh segmen-segmen pembangunan termasuk kualitas hidup sumber daya manusianya.

Bangsa Indonesia memang negara yang kaya raya, kekayaan alamnya sudah dikenal oleh bangsa-bangsa Eropa sejak berabad-abad yang lalu. Sejak kemerdekaan, berkat adanya pembangunan, kehidupan pun bertambah maju, tetapi disisi lain pembangunan ternyata sering membawa korban yaitu orang-orang yang hidupnya serba kekurangan dan sangat miskin. Mereka orang-orang miskin tersebut tersebar diseluruh pelosok desa-desa yang terpencil hal itu tidak terbatas pada kehidupan di desa saja tetapi kemiskinan juga tampak dikehidupan kota-kota besar. Hal ini disebabkan karena pembangunan itu tidak berjalan secara

merata, dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga perekonomian tidak berjalan dengan baik.

Kemiskinan yang telah berjalan dalam rentang ruang dan waktu yang panjang memastikan bahwa gejala tersebut tidak cukup diterangkan sebagai realitas ekonomi. Artinya, kemiskinan bukan hanya sekadar gejala keterbatasan lapangan kerja, pendapatan, pendidikan, dan kesehatan masyarakatnya. Kemiskinan sudah menjadi realitas sistem/ struktur dan tata nilai kemasyarakatan. Kemiskinan merupakan suatu realitas budaya yang antara lain berbentuk sikap menyerah kepada keadaan (Sasono, 1987:38).

Kemiskinan dapat berarti situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan antara lain ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat diubah, yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan, dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan (Bappenas, 1993:3).

Kemiskinan yang ada di *Kremil* termasuk kemiskinan struktural yang disebabkan karena masyarakatnya menerima kemiskinan sebagai takdir hidupnya. Mereka cenderung pasrah menerima kenyataan hidupnya sebagai seorang pekerja seks. Walaupun ada keinginan dalam diri mereka untuk hidup normal seperti manusia lainnya diluar *Kremil* tetapi keinginan mereka tidak didukung oleh ketrampilan dan modal. Mereka juga tidak siap menerima keadaan dirinya bila

keluar dari kehidupan prostitusi. Tidak adanya dukungan dari masyarakat kepada mereka yang bekerja sebagai pekerja seks. Akibatnya mereka terbelenggu dalam keadaan yang sama.

“Ah, engkau tidak tahu betapa sulitnya persoalanku menjalani hidup ini.”

“Sama! Engkau juga tidak tahu betapa sulitnya aku memecahkan persoalan hidupku ini. Namun, kita sama-sama tahu akibatnya. Yaitu kita sama-sama menempuh hidup jadi pelacur di *Kremil* ini. Berbagai persoalan hidup lintang pukang merintang langkah kita masing-masing, namun pemecahannya hampir sama: kita menempuh hidup bersama sebagai perempuan *Kremil*.”

“Ah, engkau ingin menangmu sendiri. Hidupku banyak persoalan, rumit dan sulit. Andaikata bukan aku, mungkin sudah tidak kuat lagi menderita nasib begini. Kalau orang lain mungkin sudah gila menjalani nasib seperti nasibku ini!” keluh Tumiyah sambil memandang jauh.

“Nah, mungkin itu perbedaan kita. Engkau terlalu memandangi dirimu sendiri dari sisi rasa nelangsa, begitu kasihan kepada diri sendiri dan iri hati dengan nasib baik orang lain. Sedangkan aku tidak. Aku memandang hidupku ini, nasibku ini, betapa pun juga adalah pemberian Allah, yang harus kuterima. Jadi sekarang ini kita duduk bersanding berduaan begini, sama-sama sebagai pelacur di *kremil*, engkau merasa dirimu, nasibmu, sengsara, sedang aku merasa bersyukur diberi nasib begini. Kamu ora nrima, aku bersyukur. Padahal kita sama-sama pelacur, bernafas lewat hidung, makan tidak pernah kelaparan dijamin oleh Bu Tinny.” (Brata:542).

*Kremil* adalah sebuah perkampungan pelacuran yang berada di sebelah barat kota Surabaya. Kondisi tanahnya yang tidak begitu subur membuat penghuninya berpikir untuk mencari cara yang tepat untuk bisa mempertahankan hidupnya. Karena mereka tidak mungkin mengandalkan tanahnya untuk mata pencaharian. Gemerlap kehidupan di *Kremil* sebagai daerah bekas rawa-rawa adalah hasil daya dan rekayasa pikiran manusia penghuninya.

“Ini tanah pendudukan liar. Dulunya rawa-rawa. Milik Kotamadya. Jadi kalau Kotamadya menggusur kampung ini berarti mengambil alih miliknya sendiri, “keterangan Prali.

“Wah, hebat juga, ya! Mereka kuat membiayai membiayai diesel. Tidak ketinggalan zaman. Malah di kampung-kampung dalam kota yang belum kena jaringan PLN, belum ada yang menggunakan diesel. Mereka menunggu perpanjangan kawat PLN menjangkau kampungnya, dalam keadaan tak berdaya mengusir kegelapan malam.” (Brata:32).

Keindahan dan gemerlap *Kremil* tampak sebagai kampung yang makmur, tentram, serta harmonis namun kenyataan sebenarnya tidaklah demikian. Dibalik gemerlap *Kremil*, banyak masalah-masalah yang bagi warga *Kremil* sendiri justru tidak pernah dianggap sebagai masalah. Meskipun pada kenyataannya mereka sering menjadi korban ketidakadilan dan korban pelecehan laki-laki seperti yang dialami oleh beberapa tokoh berikut ini.

“Siap-siap saja nanti malam kita mendengarkan tangis penyesalan seorang anak perawan... Itulah bodohnya perempuan! Ketika kehilangan menyesal, namun tahu sedang direbut tidak mau teriak-teriak minta tolong!” jawab Ningsih. “Dan adat kebiasaan kita, mendengar teriak-teriak begitu, atau pun hanya mendengar ceritanya, ikut tertawa geli. Kita ikut bicara, perkosaan itu sebagai bahan pembicaraan yang menggairahkan. Kejam! Mestinya kita harus menolongnya, membelanya. Teriakan itu minta tolong karena ada perampasan hak milik! Tapi adat kita tidak ambil peduli. Adat kita melecehkan perempuan! Kejam sekali!” (Brata:8-9).

“Kamu tidak boleh bentrok dengan laki-laki. Kamu harus mencintai semua laki-laki, betapa dan bagaimana pun kasar tindak-tanduknya, maupun jelek wajahnya. Karena dari cinta itulah datang rezekimu.” (Brata:285).

“Mariyun! Mariyun! Kejam, Kamu! Kartimah masih ketakutan dibayangi peristiwa kemarin! Masih belum mau bertemu dengan kamu maupun ibumu! Jangan kaupaksa! Kamu ini kena apa, Yun! Laki-laki kok main kekerasan sama perempuan!” (Brata:328).

“Kamu jangan menghina polisi, Ningsih! Kamu hanya pelacur!”

“Sebagai pelacur warga *Kremil*, aku telah menceritakan fakta, menceritakan hal yang benar. Apa seorang pelacur tidak bisa benar? Apakah yang benar itu hanyalah pada polisi?” Ningsih kian jalang suaranya. (Brata:624).

Ketidakadilan atas apa yang dilakukan oleh masyarakat luas terhadap dirinya, ketidakadilan dari pemerintah yang tidak mau menyentuh *Kremil* dengan program pembangunannya tetapi mengenakan pajak terhadap masyarakat *Kremil*, seperti pengakuan seorang pejabat tentang *Kremil* itu sendiri.

“Sebenarnya *Kremil* ini secara tersamar bisa dijadikan proyek percontohan swakelola suatu kampung. Suatu kampung yang berkembang swasembada, tidak dibantu sama sekali oleh pemerintah, bahkan pengakuan sebagai kampung resmi saja tidak.”

“Mereka merasa sendiri, bahwa *Kremil* kampung hunian liar, tidak resmi, jadi tentunya lahan peruntukannya akan ditentukan oleh Walikota madya.” (Brata:41-42).

*Kremil* merupakan lukisan kecil kehidupan lokalisasi para pekerja seks komersil. Kehidupan orang-orang yang terbuang dari kehidupan masyarakat normal. Para penghuni *Kremil* merupakan orang-orang korban dari represi seksual yang dilakukan oleh masyarakat di luar *Kremil*, sebab ketabuan akan seksualitas.

“Tidak mungkin seseorang bisa kejangkitan cinta, dan mau berkorban apa saja demi bau ketiak perempuan *Kremil*. Yang terjadi hanyalah membara dan berkobarnya nafsu birahi belaka. Nafsu birahi laki-laki hidung belang kepada perempuan pelacur. Habis nafsu, habis selera. Tumbuh nafsu, pilih selera yang lain, mana suka. Tidak gandrung asmara untuk dimonopoli atau selamanya. Tai kucing, kalau terjadi begitu.” (Brata:85).

*Kremil* adalah tempat para pekerja seks komersial untuk mencari rezeki dan penghasilan. Tidak hanya para mucikari dan anak semangnya saja yang



mencari rezeki di *Kremil*, tetapi juga para pedagang yang jujur dan hidup normal semestinya masyarakat.

“Selain laki-laki pencari kesenangan malam ada juga kedai makanan berjalan. Ada penjual mi, tahu-thek dari Lamongan, kacang rebus, dan kedai berjalan macam-macam. Artinya yang dijual bermacam-macam makanan: pisang goreng, randha-royal, nagasari, lemet. Sebab sebagian besar kedai yang terang benderang itu hanya menjual makanan dan minuman ringan. Mereka yang ingin makan kenyang pada beli makanan di luar kedai. Keramaian malam di *Kremil* juga memberi kesempatan kepada pemusik jalanan mencari rezekinya.” (Brata:232).

Ketidakadilan ini lebih dirasakan oleh wanita-wanita pekerja seks, mereka bekerja penuh untuk mendapatkan upah tetapi mereka tidak dapat menikmati hasil jerih payahnya secara penuh. Sebagian pendapatannya dipotong untuk disetorkan kepada mucikarinya, sehingga apa yang mereka hasilkan hari itu selalu habis untuk kebutuhan hidup mereka, walaupun ada sisa uang, mereka biasanya mengirimkan kekekuarganya. Hal ini akan semakin teras jika salah satu dari mereka ada yang terkena penyakit dan membutuhkan uang untuk berobat.

Kemiskinan adalah suatu kenyataan hidup yang terjadi di *Kremil*. Kemiskinan dan terbatasnya ketrampilan yang dimiliki oleh wanita-wanita *Kremil* menjadi salah satu faktor keterpurukan mereka dalam dunianya. Masalah kemiskinan, rendahnya pendidikan dan ketrampilan yang mereka miliki membuat mereka sering menjadi korban. Selama ini keadaan demikian tidak pernah dipermasalahkan apalagi dipertanyakan. Tidak ada yang mengeluh dan mencari kemungkinan memperoleh matapencaharian lain. Masalah kemiskinan menyebabkan tindak kriminalitas meningkat. Kemiskinan juga dituding memiliki pengaruh kuat terhadap maraknya pelacuran di Indonesia, seperti yang dialami

oleh Boyani dan Tumiyah. Mereka hidup sebagai pelacur karena desakan ekonomi dan tidak memiliki ketrampilan dan ilmu sehingga mereka menjalani hidupnya sebagai wanita *Kremil*.

“Masa lalu Boyani mengalami penderitaan dan perjuangan yang melelahkan. Penuh gejolak yang mengancam dia ke dunia kehidupan lebih sengsara. keluarganya turun temurun ya miskin seperti itu. Umur empat belas tahun sudah menikah. Boyani dibawa ke tempat lain, dicerabut dari lingkungan asalnya., dan terasa menjadi orang tidak bebas lagi. Kewajiban sebagai istri, sebagai menantu, sebagai pembantu pencari nafkah, mencari ikan di laut, dan menjualnya di pasar. Lahir batin terbatas kebebasannya. Dari pelarian ke pelarian, akhirnya ia tahu, harus melenyapkan diri dari kerabat dan kenalannya. Pergi membebaskan diri dari keterikatan keluarga. Sampailah dia ke *Kremil*.” (Brata:304).

“Aku telah berjuang merebut dan mempertahankan hidup ini dengan bersusah payah. Sebelum sampai di *Kremil* ini riwayatku penuh bercucuran darah dan ancaman maut. Keluargaku, kerabatku, teman seperjuanganku, banyak yang terbunuh. Aku terlepas dari maut karena melarikan diri seorang diri ke sini. Sekarang di sini aku bisa menyusun kekuatan, bisa merasakan hidup lumayan, karena menjual kehormatan, berkorban menjual diri. Aku hidup tanpa memikirkan harga diri lagi, tetapi lumayan bisa menyiapkan masa depan anak-anakku agar hidup lebih baik.” (Brata:544).

Menjadi seorang pekerja seks bukanlah cita-cita mereka tetapi nasib yang membawa mereka menjadi seperti ini. Mereka tidak tidak dapat mengerjakan pekerjaan lain selain menjadi pedagang cinta. Hal ini berhubungan dengan keadaan tanah di *Kremil* yang tidak subur dan kering. Bekerja sebagai seorang pekerja seks sebenarnya tidaklah memberi keuntungan secara ekonomis. Meskipun begitu, bekerja sebagai pekerja seks adalah satu-satunya pekerjaan yang banyak dilakukan oleh penghuni *Kremil*. Resiko terkena penyakit kelamin ganas yang mematikan merupakan ancaman bagi mereka. Oleh karena itu mereka harus

berhati-hati dalam menerima tamu. Karena biaya berobat yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan hidup mereka. Kekhawatiran akan terkena penyakit selalu menghantui penghuni *Kremil*, seperti yang terjadi pada diri Tumiyah berikut ini.

“Biar! Biar! Biar aku berdosa! Biar aku sengsara, batinku goyah, selalu khawatir, biar! Hidup-hidupku sendiri! Yang berhak menilai diriku adalah aku, bukan kamu. Aku tidak mungkin sengsara seperti Yu Ni. Aku tidak kena penyakit raja singa! Tidak tewas dibunuh! Oo, hanya orang-orang yang terlalu besar dosanya menderita kesengsaraan seperti itu!” Suara tumiyah tidak galak seperti tadi, matanya berkaca-kaca.” (Brata:712).

Mucikari mereka tidak mau menanggung biaya pengobatan anak semangnya yang terkena penyakit. Mereka ditelantarkan kecuali jika ada simpanan uang baru mucikari dan yang lainnya mau menolongnya dengan membawanya ke dokter.

“uangnya dari mana?”

“Yu Ni diberi uang banyak oleh Liong. Di dalam tasnya.”

“Ah, ada saja “ keluh Bu Tinny.

“Bagaimana?” Tumiyah datang bergabung.

“Kata ningsih sakitnya tidak begitu parah. Minta pulang kesini. Bikin repot kita. Entahlah, terserah ningsih, ia masih punya kesabaran.” (Brata:559).

Kemiskinan dalam kehidupan kaum pekerja seks disampaikan oleh pengarang dalam novel *Kremil*. Melalui tokoh-tokohnya, pengarang mengemukakan bagaimana kerasnya kehidupan yang harus dialami oleh para pekerja seks. Persaingan antar sesama pekerja seks ada kalanya memicu keributan. Keadaan ini harus mereka lakukan untuk mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin. Biaya hidup kian hari terus meningkat, mereka yang berpenghasilan tidak menentu tiap harinya harus berjuang untuk mendapatkan

rejecki saat malam menjelang. Mereka juga kerap menjadi sasaran penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang berpura-pura sebagai pelanggan. Peristiwa pembunuhan juga terjadi di kehidupan *Kremil*, salah satunya yang menimpa seorang pelacur di Wisma Arumdalu.

“Tidak. Ia datang dengan tangan kosong. O, tidak, bawa map. Seperti pegawai kantor kecamatan. Anu, mengenakan baju safari coklat. Tiga hari datang, pakaiannya ya itu-itu saja.”

“Ya. Menilik potongan dan gayanya, saya kira dia seorang pejabat, atau pegawai tingkat atas,” Keterangan Bu Ambar. (Brata:570).

“Tidak! Hari Rabu ini hari terahir seminarnya. Itu keterangan Ninik ketika disuruh tamunya ambil bir kepadaku. Ninik juga minta pinjam pisau. Katanya tamunya bawa oleh-oleh apel, suguhan makan siang di seminar. Pisau tadi untuk mengiris apel. Mau kuambilkan pisau dapur, Ninik minta yang kaku. Kuambilkan pisau belati, Ninik mau.”

“Wah! Itu sudah direncanakan! Pisau belati itu permintaan tamunya untuk membunuh Ninik.” (Brata:571).

“Kupanggil-panggil Ninik, tidak menyahut. Tamunya juga tidak bersuara. Aku beranikan masuk menengoknya. Ninik terbaring di tempat tidurnya. Tertelentang. Setelah pandang mataku terbiasa dengan gelap, aku tahu bahwa dia telah tak bernyawa. Dadanya bersimbah darah. Aku ketakutan, lari ke luar. Berteriak minta tolong. Yang kubayangkan minta tolong kepada Pak RT Maruto, “Kisah Bu Ambar dengan tergap-gagap. Bercerita kepada Parno tanpa diminta. Gugup sekali.” (Brata:568).

“Yang paling menggemparkan dan itu sudah diperkirakan oleh para saksi, perhiasan Ninik baik yang dikenakan maupun yang tersimpan di laci lemarnya, lenyap semua. Juga uang di dompet dan di lemari, tidak sesen pun tersisa. Dengan surat-surat pembelian perhiasan, ikut dikuras oleh pembunuhnya.” (Brata:572).

*Kremil* yang sebagian besar penduduknya perempuan yang berprofesi sebagai pelacur, perlu mendapatkan perlindungan hukum, karena mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil, rendahnya pendidikan dan lemahnya

kekuatan seorang wanita *Kremil* sering dijadikan sasaran penipuan dan pemerasan. Perlindungan hukum sepertinya tidak mungkin ada untuk penghuni *Kremil* karena segala aktivitas *Kremil* termasuk perbuatan yang ilegal. Sehingga mereka selalu menjadi korban dan tidak berdaya dalam menghadapi ketidakadilan.

“Mereka tetap menganggap kita ini manusia sesat, sedang kita tahu, kita ini perempuan-perempuanpejuang yang antiketidakadilan, antipemaksaan dan anti kekerasan...Kita, kaum perempuan di *Kremil* ini memang korban ketidakadilan dan kekerasan, manusia-manusia yang kalah dalam percaturan hidup. Namun kita tidak menyerah untuk bertahan hidup dengan damai dan senang. Tidak menyerah. Bukan manusia yang menentukan dan menilai, melainkan Tuhan Sarwa Sekalian Alam juga yang memutar hidup ini. Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang memberi hidup dan keadilan, seperti yang kita perjuangkan di *Kremil* selama ini.” (Brata:710).

Konsep-konsep hidup seperti *manungsa mung saderma nglakoni* atau konsep *nrima ing pandum*, merupakan sikap mental yang dianut warga *Kremil*. Akibatnya mereka sulit mengubah kehidupan, termasuk sulit untuk mengubah kemiskinan yang mereka derita. Pembangunan dan kemajuan teknologi serta modernisasi yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat tidak berhasil dengan baik. Penyebabnya karena mereka belum siap mental untuk menerima berbagai perubahan tersebut, seperti tokoh Tumiyah yang selalu merasa tidak siap menjalani perubahan yang terjadi, saat Bu Tinny berencana untuk menutup rumah bordil tempat Tumiyah tinggal.

“Itu kata hatimu yang iri, menganggap nasib orang lain lebih baik. Persoalan yang hakiki adalah: kamu selalu tidak siap menghadapi perubahan, sedang aku siap. Padahal keadaan dunia ini tidak pernah berhenti berubah. Sekarang siang, nanti

berhati-hati dalam menerima tamu. Karena biaya berobat yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan hidup mereka. Kekhawatiran akan terkena penyakit selalu menghantui penghuni *Kremil*, seperti yang terjadi pada diri Tumiyah berikut ini.

“Biar! Biar! Biar aku berdosa! Biar aku sengsara, batinku goyah, selalu khawatir, biar! Hidup-hidupku sendiri! Yang berhak menilai diriku adalah aku, bukan kamu. Aku tidak mungkin sengsara seperti Yu Ni. Aku tidak kena penyakit raja singa! Tidak tewas dibunuh! Oo, hanya orang-orang yang terlalu besar dosanya menderita kesengsaraan seperti itu!” Suara tumiyah tidak galak seperti tadi, matanya berkaca-kaca.” (Brata:712).

Mucikari mereka tidak mau menanggung biaya pengobatan anak semangnya yang terkena penyakit. Mereka ditelantarkan kecuali jika ada simpanan uang baru mucikari dan yang lainnya mau menolongnya dengan membawanya ke dokter.

“uangnya dari mana?”

“Yu Ni diberi uang banyak oleh Liong. Di dalam tasnya.”

“Ah, ada saja “ keluh Bu Tinny.

“Bagaimana?” Tumiyah datang bergabung.

“Kata ningsih sakitnya tidak begitu parah. Minta pulang kesini. Bikin repot kita. Entahlah, terserah ningsih, ia masih punya kesabaran.” (Brata:559).

Kemiskinan dalam kehidupan kaum pekerja seks disampaikan oleh pengarang dalam novel *Kremil*. Melalui tokoh-tokohnya, pengarang mengemukakan bagaimana kerasnya kehidupan yang harus dialami oleh para pekerja seks. Persaingan antar sesama pekerja seks ada kalanya memicu keributan. Keadaan ini harus mereka lakukan untuk mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin. Biaya hidup kian hari terus meningkat, mereka yang berpenghasilan tidak menentu tiap harinya harus berjuang untuk mendapatkan

rejekinya saat malam menjelang. Mereka juga kerap menjadi sasaran penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang berpura-pura sebagai pelanggan. Peristiwa pembunuhan juga terjadi di kehidupan *Kremil*, salah satunya yang menimpa seorang pelacur di Wisma Arumdalu.

“Tidak. Ia datang dengan tangan kosong. O, tidak, bawa map. Seperti pegawai kantor kecamatan. Anu, mengenakan baju safari coklat. Tiga hari datang, pakaiannya ya itu-itu saja.”

“Ya. Menilik potongan dan gayanya, saya kira dia seorang pejabat, atau pegawai tingkat atas,” Keterangan Bu Ambar. (Brata:570).

“Tidak! Hari Rabu ini hari terahir seminarnya. Itu keterangan Ninik ketika disuruh tamunya ambil bir kepadaku. Ninik juga minta pinjam pisau. Katanya tamunya bawa oleh-oleh apel, suguhan makan siang di seminar. Pisau tadi untuk mengiris apel. Mau kuambil pisau dapur, Ninik minta yang kaku. Kuambil pisau belati, Ninik mau.”

“Wah! Itu sudah direncanakan! Pisau belati itu permintaan tamunya untuk membunuh Ninik.” (Brata:571).

“Kupanggil-panggil Ninik, tidak menyahut. Tamunya juga tidak bersuara. Aku beranikan masuk menengoknya. Ninik terbaring di tempat tidurnya. Tertelentang. Setelah pandang mataku terbiasa dengan gelap, aku tahu bahwa dia telah tak bernyawa. Dadanya bersimbah darah. Aku ketakutan, lari ke luar. Berteriak minta tolong. Yang kubayangkan minta tolong kepada Pak RT Maruto, “Kisah Bu Ambar dengan tergap-gagap. Bercerita kepada Parno tanpa diminta. Gugup sekali.” (Brata:568).

“Yang paling menggemparkan dan itu sudah diperkirakan oleh para saksi, perhiasan Ninik baik yang dikenakan maupun yang tersimpan di laci lemarnya, lenyap semua. Juga uang di dompet dan di lemari, tidak sesen pun tersisa. Dengan surat-surat pembelian perhiasan, ikut dikuras oleh pembunuhnya.” (Brata:572).

*Kremil* yang sebagian besar penduduknya perempuan yang berprofesi sebagai pelacur, perlu mendapatkan perlindungan hukum, karena mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil, rendahnya pendidikan dan lemahnya

kekuatan seorang wanita *Kremil* sering dijadikan sasaran penipuan dan pemerasan. Perlindungan hukum sepertinya tidak mungkin ada untuk penghuni *Kremil* karena segala aktivitas *Kremil* termasuk perbuatan yang ilegal. Sehingga mereka selalu menjadi korban dan tidak berdaya dalam menghadapi ketidakadilan.

“Mereka tetap menganggap kita ini manusia sesat, sedang kita tahu, kita ini perempuan-perempuanpejuang yang antiketidakadilan, antipemaksaan dan anti kekerasan... Kita, kaum perempuan di *Kremil* ini memang korban ketidakadilan dan kekerasan, manusia-manusia yang kalah dalam percaturan hidup. Namun kita tidak menyerah untuk bertahan hidup dengan damai dan senang. Tidak menyerah. Bukan manusia yang menentukan dan menilai, melainkan Tuhan Sarwa Sekalian Alam juga yang memutar hidup ini. Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang memberi hidup dan keadilan, seperti yang kita perjuangkan di *Kremil* selama ini.” (Brata:710).

Konsep-konsep hidup seperti *manungsa mung saderma nglakoni* atau konsep *nrina ing pandum*, merupakan sikap mental yang dianut warga *Kremil*. Akibatnya mereka sulit mengubah kehidupan, termasuk sulit untuk mengubah kemiskinan yang mereka derita. Pembangunan dan kemajuan teknologi serta modernisasi yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat tidak berhasil dengan baik. Penyebabnya karena mereka belum siap mental untuk menerima berbagai perubahan tersebut, seperti tokoh Tumiyah yang selalu merasa tidak siap menjalani perubahan yang terjadi, saat Bu Tinny berencana untuk menutup rumah bordil tempat Tumiyah tinggal.

“Itu kata hatimu yang iri, menganggap nasib orang lain lebih baik. Persoalan yang hakiki adalah: kamu selalu tidak siap menghadapi perubahan, sedang aku siap. Padahal keadaan dunia ini tidak pernah berhenti berubah. Sekarang siang, nanti



sebentar lagi malam. Engkau kini cantik, tahun depan bertambah tua, keriput.”

“Tetapi dengan ayahmu, kamu masih kaya, masih punya rumah, punya kehidupan mapan. Sedang aku? Keluar dari Kremil ini, mana bisa hidup?” (Brata:543).

Sikap mental warga *Kremil* juga turut mempengaruhi kemajuan bagi dirinya. Mereka tidak pernah berusaha untuk mengubah kehidupannya sendiri karena menganggap bahwa kemiskinan yang mereka alami adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang mengatur semuanya dan manusia hanya sekadar menjalaninya (*mung saderma nglakoni*). Mereka sudah cukup puas meskipun kehidupan mereka sangat menderita akibat kemiskinan yang membelenggu mereka.

Pekerjaan warga *Kremil* yang mayoritas sebagai pekerja seks sebenarnya tidak menghasilkan keuntungan secara ekonomis. Penghasilan yang mereka dapatkan hanya cukup untuk bertahan hidup. Belum lagi harus dipotong untuk diberikan kepada mucikarinya. Para pekerja seks sangat bergantung kepada mucikari, karena mucikari ini juga berperan untuk mendapatkan pelanggan bagi anak semangnya serta memberikan pengayoman tempat tinggal. Anak semang mucikari selalu tunduk terhadap perintah yang ditetapkan oleh mucikarinya karena mereka sama-sama membutuhkan dan saling membantu dalam mendapatkan rejeki.

“Boyani kerasan di rumah Bu Yuyun. Sekalipun Bu Yuyun bertindak keras terhadap anak buahnya, namun sekeras-kerasnya bu Yuyun, tindakannya itu disertai rasa kasih sayang untuk memelihara hidup yang enak, pergaulan yang bebas. Boyani senang karena ia termasuk anak buah Bu Yuyun yang laris. Dan ia tahu benar, kelarisannya itu berkat acuan Bu Yuyun terhadap tamu-tamunya, bahwa milik Boyani istimewa. Banyak digemari dan dicari laki-laki.” (Brata:306).

Peran seorang mucikari dalam mendapatkan pelanggan bagi anak buahnya sangat besar. Mucikari selalu mempromosikan anak semangnya kepada pelanggan dengan menjelaskan keistimewaan yang dimiliki setiap anak semangnya, dan usaha mucikari itu selalu berhasil dan membuat anak semangnya laris. Tentu saja keadaan seperti ini yang selalu diharapkan dalam kehidupan di *Kremil*.

Kemiskinan dituding sebagai sumber kriminalitas. Angka kemiskinan di Indonesia kian meningkat. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang harus dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan sekitar duapuluh tujuh juta jiwa lebih, atau sekitar 18,2 persen dari seluruh penduduk Indonesia. (*Surabaya Pos* 2002:5). Saat ini Bangsa Indonesia belum mampu keluar dari keterpurukan krisis ekonomi. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengentas kemiskinan. Tampaknya usaha ini belum berhasil maksimal. Kemiskinan yang dialami Bangsa Indonesia merupakan dampak yang diperbuat oleh oknum-oknum pemerintah yang korupsi. Kerugian yang dialami bangsa kita, membawa dampak krisis moneter yang pada akhirnya mengakibatkan kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di *Kremil* juga menyebabkan beberapa tindak kriminalitas, diantaranya penipuan, perkelahian antar pelacur dalam memperebutkan pelanggan, bahkan pembunuhan juga terjadi.

“Tampaknya para petugas polisi mengusut peristiwa itu seperti melaksanakan tugas rutin. Di *Kremil* memang sering terjadi tindak kejahatan. Termasuk pembunuhan. Pelaku kejahatan biasanya cepat bisa ditangkap, karena banyak saksi yang melihat. Kejahatan dilakukan karena dendam, atau pelakunya sedang mabuk, dilakukan tanpa sembunyi-sembunyi. *Kremil* memang gudangnya orang berbuat jahat. Sehingga polisi menangani secara rutin. Seringkali dilakukan penyelidikan dan penangkapan penjahat dengan hati kesal. Saking banyaknya kejahatan terjadi di *Kremil*.” (Brata:577).

Maraknya aksi kriminalitas ini dipicu karena perekonomian yang sulit. Krisis moneter yang melanda negeri ini membawa laju pembangunan Indonesia terpuruk dalam situasi yang tidak jelas. Banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa menutup usahanya karena tidak sanggup lagi membiayai operasional yang terus meningkat, akibatnya pengangguran semakin meningkat. Dalam keadaan yang serba terjepit ini membuat masyarakat bertindak nekad dan cenderung melanggar hukum demi mempertahankan hidup mereka. Banyak kita jumpai kehidupan yang sungguh sangat memprihatinkan. Masyarakat yang hidup di desa hidup dalam keterbatasan dan serba kekurangan. Akibatnya mereka pergi meninggalkan desa menuju kota dengan harapan dapat hidup enak.

Dengan keterbatasan modal dan pendidikan mereka mengadu nasib di kota besar. Tetapi apa yang didapat diluar dugaan mereka. Keberadaan mereka justru menjadi masalah. Mereka yang tersingkirkan hidup dalam kelompok sosial masyarakat pinggiran dalam komunitas mereka. Mereka menjadi pengangguran yang akan mengarah kepada tindak kriminalitas. Tidak sedikit dari mereka yang menggantungkan hidup dengan menjual diri, anak-anak dipaksa mengemis, dan kaum lelaki melakukan aksi pencopetan, penodongan dan lainnya demi mempertahankan hidup mereka. Mereka hidup dalam lingkungan yang kumuh. Sebagian dari mereka hidup disekitar aliran sungai, membuat pemukiman di sepanjang jalur kereta api atau berada di jalanan. Lalu terbentuklah pelacuran.

Pelacur menjadi sumber pendapatan keluarga. Fenomena ini sesuai dengan kenyataan bahwa 33%-50% pendapatan pelacur dikirim untuk keluarganya. Karena keuntungan dapat dirasakan keluarga, maka pelacuran akan terus berlangsung.

Seperti Tumiyah yang melacurkan diri untuk bisa bertahan hidup dan membiayai keluarganya di desa serta menyekolahkan anak-anaknya.

“Hari raya kemarin saya ke sana. Rencanaku tiap tiga bulan sekali pulang. Melihat perkembangan Ugra dan Nani. Ugra mungkin tahun depan sudah masuk ke sekolah anak-anak. Yang kecil kemarin saya belikan boneka dakocan. Senangnya bukan main.” (Brata:20).

Banyak perempuan migran dari pedesaan yang melacur di perkotaan. Mereka melacur karena adanya motif ekonomi. Motif ekonomi ini yang dimaksudkan adalah uang. Uang sebagai faktor motivasi untuk melacur yaitu tekanan ekonomi yang ekstrem dan pelacuran yang menyediakan standar hidup paling tinggi yang dapat dicapai. Pelacuran di kota-kota besar Indonesia khususnya di Kota Surabaya, kebanyakan dilakukan oleh pendatang. Mereka berasal dari desa-desa yang ada di Jawa Timur. Kebanyakan dari mereka semula mengadu nasib di kota Surabaya tetapi kenyataannya mereka justru menjadi penjajah seks. Mereka menciptakan pelacuran di sekitar lingkungan mereka. Pelacuran meningkat pada waktu angka pengangguran tinggi dan upah rendah. Keadaan ini menyebabkan perempuan memasuki dunia perdagangan seks. Karena itu tidak mengherankan pelacuran tumbuh semakin pesat seiring krisis moneter yang melanda bangsa kita.

#### **4.1.2 Representasi Pelacuran dalam Novel *Kremil***

Pelacuran merupakan problematika bagi Bangsa Indonesia. Pelacuran di Indonesia telah terjadi sejak jaman kerajaan Majapahit (*Memorandum*, 4 September 2004). Salah satu bukti yang menunjukkan hal ini adalah penuturan

kisah-kisah perselingkuhan dalam kitab Mahabarata. Pada jaman kerajaan Mataram pelacuran malah semakin meningkat. Label daerah “plesiran” yang terdapat pada daerah Wonogiri dan Wonosari dapat dijadikan sebagai bukti. Perselingkuhan dan seks bebas (secara faktual) memang sudah terjadi sejak berabad-abad silam. Raja-raja jaman dahulu, yang secara terang-terangan melakukan perselingkuhan. Kebanyakan mereka tidak cukup hanya memiliki permaisuri, tidak cukup pula dengan seorang selir. Perempuan dari kalangan rakyat jelata (yang cantik) pun masih mereka lirik. Pelacuran di Indonesia semakin berkembang pada masa kolonial. Pada abad ke-19 terjadi peningkatan permintaan akan pelayanan akan seks.

Menurut Ivan Bloch (1991:77), pelacuran adalah bentuk perhubungan kelamin di luar pernikahan dengan pola tertentu yaitu kepada siapa pun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran baik untuk persebadanan, maupun kegiatan seks lainnya yang memberi kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.

Semasa jaman penjajahan Jepang tahun 1941-1945, jumlah dan kasus pelacuran semakin berkembang. Banyak remaja dan anak sekolah ditipu dan dipaksa menjadi pelacur untuk melayani tentara Jepang (*Surya* 25 Juli 2001). Hal ini juga diperkuat oleh pengakuan wanita-wanita bekas jajahan Jepang yang dijadikan pemuas nafsu mereka. Masalah pelacuran semakin rumit seturut dengan tingginya perpindahan penduduk, meningkatnya irama kehidupan, meningginya penghasilan untuk kelompok tertentu, dan beratnya tantangan untuk menerima prinsip moral.

Perilaku seks bebas juga terjadi pada tataran masyarakat bawah. Para penari kesenian rakyat, seperti ronggeng atau tayub banyak yang merangkap sebagai penjual seks. Keadaan ini juga terjadi dalam hubungan gelap buruh dengan majikan di pabrik-pabrik, yang pada dasarnya menjadi bibit-bibit pelacuran, seperti yang terdapat dalam novel *Kremil*. Sejarah Bu Yuyun menjadi pelacur pertama kali di sebuah kedai makanan. Karena merasa kurang cukup penghasilannya maka ia mengorbankan dirinya untuk melayani laki-laki yang bernaflu, kebanyakan mereka adalah sopir truk.

“Pulang ke Lamongan jalan kaki, kelaparan, tak sadarkan diri di daerah tambak, ditolong oleh orang yang buka kedai di situ. Jadi pembantu. Buka kedai saja kurang cukup penghasilannya, maka pembantu perawan itu dikorbankan untuk melayani laki-laki bernaflu. Kedai di tepi jalan besar di tengah ladang tambak baru satu dua yang ada, lalu lintas truk Surabaya-Gresik mulai ramai, sopirnya, kernretnya, semua lelaki yang bertenaga keras, butuh istirahat, makan, minum, dan menyalurkan nafsu. Pembelinya banyak, penjualnya sedikit. Maka untuk menambah penghasilan, Maryuni mengorbankan diri menjadi pembantu kedai dalam segala hal. Rela menjadi pembantu kedai dalam segala hal. Rela menjadi pelacur muda, dan laku juga, klarena belum banyak saingan.” (Brata:156-157).

Pada tahun 1970, pemerintah Indonesia banyak mendirikan industri penyulingan minyak. Hal itu tentu menyebabkan meningkatnya permintaan akan pelacuran, baik secara langsung atau tidak. Tahun 1990 mulai merebaknya tempat-tempat hiburan malam seperti karaoke, diskotik, dan penginapan yang juga memicu peningkatan pelacuran. Pelacuran di Indonesia berkembang dengan pesatnya, seiring dengan laju pembangunan bangsa, apalagi disaat bangsa ini belum mampu keluar dari krisis moneter yang menjerat laju ekonomi Bangsa Indonesia. Hal ini juga didukung oleh adanya faktor kemiskinan, rendahnya

pendidikan, rendahnya standar moral manusia serta keinginan untuk memperoleh status sosial sehingga semuanya mendorong terjadinya pelacuran.

Pelacuran merupakan permasalahan yang kompleks, bila kita ingin memberantas pelacuran maka hal tersebut cukup menguras pikiran dan tenaga. Betapa tidak pelacuran secara tidak langsung terkait dengan perekonomian bangsa, karena didalam pelacuran hidup berbagai sendi perekonomian rakyat yang secara tidak langsung memberikan kontribusi bagi perekonomian pemerintah, karena dengan adanya perekonomian rakyat tersebut, mereka kaum jelata mampu membayar kewajiban pajak, dan wajib pajak tersebut digunakan untuk pembangunan bangsa ini. Jadi menghilangkan pelacuran seratus persen itu hal yang mustahil ibaratnya seperti menguras air laut. Hal-hal seperti ini juga terjadi dalam novel *Kremil*. Kehidupan di *Kremil* diwarnai dengan beragam hidup, mereka berlomba-lomba untuk mengais rejeki di separoh malam disaat bursa cinta mulai dibuka. Selain para pelacur yang bekerja terdapat juga beberapa penjual makanan, tukang parkir, tukang sepir sepatu, ataupun pengamen yang mencoba mengais rejeki di tempat itu, seperti yang terdapat dalam kutipan berikut:

“Kremil, bukan hanya tempat mencari rejeki bagi para saudagar seks, perempuan jalang. Kremil juga tempat mencari rejeki bagi pedagang yang jujur, hidup suci dan suka bekerja, jual-beli sesuatu yang sesuai dengan hukum ekonomi. Bukan ekonomi rekayasa atau ekonomi pancasila yang sedang digalakan oleh para ahli ekonomi bangsa saat itu. Hanya ekonomi rakyat rendah model Kremil, sangat sederhana, siapa yang membeli harus membayar tunai.” (Brata:232).

Pelacuran di Surabaya memang tergolong sangat lama, yaitu sekitar tahun 1884 jauh sebelum Bangsa Indonesia merdeka. Kompleks pelacuran ini muncul bersamaan dengan kegiatan pembangunan jalan kereta api yang menghubungkan

kota-kota Jawa seperti Batavia (Jakarta), Bogor, Cianjur, Bandung, Cilacap, Yogyakarta, dan Surabaya oleh pemerintah kolonial Belanda yang berkuasa pada waktu itu. Pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan antara Jakarta dan Surabaya ternyata tidak hanya menumbuhkan pelacuran di dua kota besar tersebut, tetapi juga menyuburkan “bisnis lendir” di sepanjang kota-kota yang dilewati rel kereta api tersebut, terutama untuk melayani kebutuhan seksual para pekerja bangunan (Koentjoro). Dinamika masing-masing kota yang dilalui jalur kereta api itu pun tumbuh.

Kedatangan penumpang kereta api dan perubahan sosial yang menyebabkan permintaan akan pelayanan pelacuran meningkat. Sebagai buktinya, hingga kini masih dapat kita lihat banyaknya kompleks pelacuran yang dibangun di dekat stasiun kereta api di kota Surabaya. Ada Stasiun Semut, Kremil, Bangunsari, serta Tandes. Tempat-tempat tersebut digunakan untuk praktek prostitusi yang masih aktif sampai sekarang, salah satunya yang masih aktif adalah *Kremil*. Tersedianya sarana transportasi ini telah memunculkan berbagai macam aktivitas pembangunan lain seperti pendirian sarana penginapan (hotel), pemukiman baru, dan wilayah perdagangan. Disisi lain ada tuntutan para pekerja tersebut dalam pemenuhan kebutuhan seksual. Hal inilah yang kemudian memunculkan para perempuan-perempuan penghibur yang diikuti dengan tumbuhnya kompleks atau lokalisasi pelacuran.

*Kremil* merupakan salah satu gambaran pelacuran Surabaya. Pelacuran identik dengan kegiatan seksual. Seksual bagi penghuni *Kremil* adalah sesuatu yang biasa dengan meninggalkan ketabuannya. Seks menjadi bahasa bertransaksi



mereka. Warga *Kremil* yang berprofesi sebagai pekerja seks selalu menjadikan seks sebagai komoditi mereka dalam mencari rejeki. Para pelacur-pelacur itu bertingkah laku sangat berani seberani penampilan mereka dalam memikat mangsanya. Dengan berpakaian minim dan seksi, serta bertingkah menggoda mereka akan mendapatkan pelanggan.

“Malam ini mestinya aku mengenakan baju streplesku.....Aku yakin berpakaian seperti itu aku tidak kalah cantik sama Rita, atau Ninik.....”

“Dan, kau ingat, bukan, Sih. Ketika aku kenakan baju streples laki-laki mau membayarku mahal. Tapi, oh, Yu Ni rencana pesta jadi berantakan!” (Brata:705).

“Dari luar kota ya? Kok dari selatan? Tidak percaya! Selatan sana pusatnya kompleks, tidak ada jalan tembusan ke luar kota. Masuk tambak, ya? Singgah dululah, Mas! Dari luar kota kan lelah. Disini ada tukang pijit pelepas lelah.”

“Tunyah bertingkah lincah, ramah dan mendekat ke pintu pagar. Tetapi tidak sampai melangkah keluar pagar. Ketika laki-laki itu masih ragu dan enggan mendekat pada pagar, langsung saja lengannya ditangkap oleh Tunyah, ditarik lebih dekat ke pagar. Meskipun bersikap ragu dan banyak pertimbangan, namun ia membiarkan Tunyah yang genit memperlakukan akrab kepadanya. Bujuk rayu perempuan malam sangat dikenalnya, dan menyenangkan.” (Brata:137-138).

Para penghuni *Kremil* juga harus bersaing dengan sesama teman mereka dalam memperebutkan pelanggan karena kehidupan seorang pelacur tergantung dari banyaknya pelanggan yang memakainya. Bagi mereka tidak ada hari libur untuk bermain di bursa cinta. Mereka mengandalkan dandanan sebagai senjata mereka untuk memikat mangsa.

“Para penghuni kampung bersiap-siap menyongsong gelapnya hari dengan berhias diri cantik-cantik, karena tiap awal malam terselenggara pesta bermain cinta, dan mereka berusaha selalu ikut berperan dalam pesta itu. Pada tiap awal separuh malam kesempatan bagi mereka menjaring rezeki.

Tidak selalu berhasil. Dan mereka yang tidak beruntung, pada akhir separoh malam, meratapi nasibnya. Apakah ada yang salah pada dandanannya? Berhias diri adalah senjata utama mereka menjaring rezeki.” (Brata:123).

Persoalan utama yang dihadapi dalam *Kremil* adalah kurangnya mendapat perhatian dari pemerintah atas pembangunan. *Kremil* tumbuh menjadi daerah yang berswasembada. Segala yang ada di *Kremil* merupakan hasil jering payah penghuninya yang bersama-sama membangun *Kremil* menjadi tempat yang layak untuk dihuni.

“Mereka merasa sendiri, bahwa *Kremil* kampung hunian liar, tidak resmi, jadi tentunya lahan peruntukannya akan ditentukan oleh Walikota. Kunjungan dinasku dianggap mewakili Walikota, maka disambutnya dengan segala upacara, hiburan, pameran serta permohonan.” (Brata:42).

*Kremil* merupakan salah satu lokalisasi yang masih eksis, dibandingkan lokalisasi lainnya di Surabaya. Bertahannya lokalisasi *Kremil* melibatkan beberapa pihak. Pihak yang terlibat untuk mempertahankan lokalisasi *Kremil* dan lainnya adalah Pemerintah Daerah yang mengatur *Kremil* dalam wilayah otonominya, baik itu Kelurahan atau Kecamatan.

“Apa peduli Lurah dan Camat?”

“Lo! Setoran mereka ke Lurah dan Camat juga besar, Bas! E, Burhan! Kamu tahu, kalau di daerah perkotaan, untuk memilih orang jadi Ketua Rukun Kampung susahnya bukan main. Semua menolak, karena RK merupakan penguasa sosial yang cuma bikin repot melulu. Ketua RK tidak digaji, tapi disuruh menggali keuangan sendiri untuk kemajuan kampungnya. Di sini, ketua RK itu diperebutkan. Penghasilan seorang ketua RK di sini, lima ratus ribu rupiah sebulan. Sama dengan gajiku, seorang sarjana dengan masa kerja tiga tahun beserta tunjangan jabatan, serta yang lain-lain! Diperebutkan, Bas! Sama dengan pemilihan lurah di

desa,” ujar Prali, Pejabat Penerangan Kotamadya.”  
(Brata:41).

Lokalisasi *Kremil* sangat membantu Pemerintah Daerah yaitu melalui penghasilan pajak. *Kremil* merupakan sumber devisa bagi pemerintah. Bahkan tidak menutup kemungkinan *Kremil* sering dikunjungi oleh pejabat pemerintah dan aparatnya (polisi) untuk menghilangkan lelah dan rasa bosan bekerja, atau untuk mencari kesenangan bagi pejabat daerah atau mereka yang sedang dinas dari luar kota. Seperti yang dilakukan oleh kedua tokoh pejabat yang bernama Sholeh dan Prali dalam novel *Kremil* berikut ini.

“Aku suka pelayanan itu. Aku suka pelayanan Arni. Aku suka membayarnya dengan mahal. Di sini aku merasa kerasan, merasa teduh, memperoleh kegairahan yang lepas. Tenaga dan semangat baru timbul setelah pertemuan dengan Arni.”

“Dan engkau lupa maksud sebenarnya kunjungan kerjamu ke sini sebagai utusan Walikota?”

“Tidak. Aku tetap mengerjakan apa maksud kunjungan kerjaku. Tapi bukan salahku kalau mereka salah sangka, dan menyambutku dengan memperkenalkan Arni. Dan hubunganku dengan Arni sama sekali tidak mengganggu kerjaku sebagai Pejabat Tata Kota. Aku membutuhkan Arni sebagai pemacu semangat kerja, itu saja.” (Brata:42-43).

Kunjungan Sholeh dan teman-temannya berlanjut menjadi hubungan percintaan seorang pejabat dengan wanita penghibur. Fenomena ini tidak saja terjadi dalam novel *Kremil* saja tetapi juga terjadi dalam realitas sebenarnya. Bahkan pejabat atau kunjungan-kunjungan pejabat selalu dekat dengan wanita penghibur. Hal itu tidak dapat dipungkiri dalam masyarakat kita, sehingga adakalanya maksud kunjungan atau tugas dinas mereka justru terlupakan, mereka lebih memfokuskan mencari kesenangan pribadi. Kedua tokoh Sholeh dan Prali

terlena oleh kisah asmaara mereka di *Kremil*. Sehingga hal ini juga menguntungkan warga *Kremil* yang tidak jadi digusur tanahnya untuk dijadikan perkotaan.

“Lalu, apa rencana pemerinah tentang tempat ini? Benarkah tempat ini segera digusur?” tanya Basuki perlahan kepada pejabat tata-kota.

“Belum ada rencana apa-apa. Walikota masih mencurahkan perhatiannya untuk membenahi kampung kumuh di dalam kota.”

“Seperti biasanya, pemerintah atau Walikota bertindak terlambat,” gumam Si Wartawan (Brata:33-34).

Jadi, penguasa (pemerintah dan aparatnya) terlibat dalam menjalankan aktivitas di lokasi *Kremil*. Keterlibatannya tersebut ditunjukkan dengan masih beroperasinya aktivitas lokasi *Kremil*.

Dengan keterbatasan biaya dan bantuan, *Kremil* berubah dari daerah rawa-rawa menjadi daerah yang padat penduduknya. Kehidupan *Kremil* sangat beragam. Keberagaman itu terwujud dalam bursa cinta yang dijajakan oleh wanita-wanita, serta penghuni lainnya yang tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan seksual. Seperti pedagang kecil yang menjajakan makanan, jasa keamanan, tukang parkir. Mereka mengandalkan penghuni lokasi dan pelanggan yang datang untuk mencari rejeki.

Hasil yang didapatkan oleh warga *Kremil* sebagian disetorkan untuk pemerintah. Karena bagaimanapun juga *Kremil* adalah kampung ilegal ditambah lagi dengan kegiatan didalamnya yang bersifat amoral. Mereka memberikan hasil tersebut kepada pemerintah karena tidak ingin *Kremil* ditutup. Warga *Kremil* memerlukan lahan mereka untuk mencari rejeki. Seperti yang dilakukan oleh pegawai kotamadya beberapa waktu yang lalu. Mereka berencana menggusur

*Kremil* dan membangunnya menjadi kota. Tetapi usaha itu gagal mengingat pemasukan pajak bagi pemerintah cukup tinggi ditambah dengan kunjungan-kunjungan pejabat ke *Kremil*. Pemasukan pajak tersebut tidak langsung masuk ke Pemerintah Kota tetapi melalui kecamatan dan kelurahan. Kecamatan dan kelurahan itu sendiri tidak lain merupakan jalur menuju Pemerintah kota.

Disamping memperoleh pajak dari penghuni *Kremil*, kelurahan juga mendapat penghasilan dari penjualan lahan baru sehingga lokalisasi *Kremil* semakin luas dan semakin ramai. Seperti kutipan berikut ini:

“Dengan sampah di kompleks selalu dibuang di situ, diharapkan rawa menjadi dangkal dan akhirnya kering, maka bisa didirikan rumah-rumah gubug untuk tempat kediaman baru. Biasanya mendekati kering sudah dikapling dan diperjualbelikan oleh pengurus kampung. Kompleks menjadi lebih luas, bertambah penghuninya, bertambah reja. Ramai, damai penuh kemitraan. Hal itu telah menjadi permufakatan kampung sebagai perencanaan pembangunan jangka panjang.”  
”Brata:146).

Dengan penjualan tanah tersebut maka kelurahan akan mendapatkan keuntungan. Pemasukan pajak lainnya adalah tiket masuk ke *Kremil* pada malam harinya serta biaya parkir untuk kendaraan pengunjung.

“Nah, kalau mau tidur cari memang di sini, Pak. Kalau dating siang-siang, boleh berkendara masuk kompleks. Tapi kalau saya sudah berjaga di sini, keadaannya berbeda. Seandainya pasar malam, loket karcis, Pak. Murah saja. Satu orang sepuluh rupiah.” (Brata:125).

Pemasukan pajak juga didapat dari tamu yang ingin menginap semalam di *Kremil*. Para mucikari wajib lapor kepada petugas keamanan apabila ada tamu yang menginap di kedainya. Mereka dikenakan biaya tambahan sebesar seratus

rupiah dan menyertakan surat keterangan diri kepada mucikari yang diinapinya.

Seperti kutipan di bawah ini:

“E, e, eee! Pak! Nanti malam kan mau menginap. Kalau menginap lapor sama ibu yang punya warung. Berikan surat keterangan diri dan uang seratus rupiah.” (Brata:126).

Oleh karena itu yang sangat dirugikan apabila *Kremil* digusur adalah pihak kelurahan. Segala upaya dilakukan untuk mempertahankan keberadaan lokalisasi *Kremil*. Lokalisasi *Kremil* tetap eksis walaupun masyarakat di luar lokalisasi menganggapnya sebagai aktivitas yang ilegal. *Kremil* hanyalah sebagian kecil lokalisasi yang ada di Indonesia dan sampai sekarang masih ada.

Tidak hanya lembaga pemerintahan yang terlibat untuk mempertahankan keberadaan lokalisasi *Kremil*. Para polisi juga terlibat di dalamnya. Kebiasaan polisi datang ke lokalisasi untuk mencari kesenangan pribadi. Mereka selalu mendapat pelayanan khusus dari penghuni *Kremil*. Karena dengan memberikan pelayanan kepada polisi, mereka para pekerja seks tersebut akan mendapatkan perlindungan dalam menjalankan aktivitasnya. Mereka juga mencari amannya saja ketika polisi-polisi tersebut datang dengan memberikan pelayanan khusus. Bisa jadi keberadaan polisi-polisi ini karena mereka juga terkait dengan kepemilikan salah satu rumah bordil, atau mem-*back up* prostitusi itu sendiri dengan kekuasaannya. Seperti yang dituturkan pengarang dalam novel *Kremil*. Peran tokoh Leo dalam wisma Bu Tinny sebagai pemilik sekaligus pemberi perlindungan terhadap penghuninya. Selain Pak Leo juga ada Pak Jlantik seorang polisi yang memiliki usaha rumah bordil di *Kremil*.

“Bu Tinny sendiri di Kremil dikenal sebagai istri simpanan Pak Leo, seorang kapten polisi. Pak Leo yang menempatkan Bu Tinny di situ, membuka rumah bordil.” (Brata:6).

“Mariyun mengantar Pardi. Rumah Pak Jlantik lebih dekat. Sebentar kemudian datang polisi Jlantik dan ketua RT Maruto yang dijemput oleh Pardi.” (Brata:568-569).

Ada suatu keterkaitan pelacuran dengan pejabat. Ketika melakukan kunjungan dinas, pejabat-pejabat seringkali disuguhi wanita-wanita cantik. Wanita-wanita ini adalah pekerja seks komersial pilihan, sesuai dengan selera pejabat tersebut.

“Agaknya Lurah memerintahkan agar dicarikan pelayan hidangan dari anak buah kompleks yang tercantik. Dan aku tertaut salah seorang di antaranya. Kebetulan anak buah Bu Yuyun sendiri. Beberapa kali aku melakukan kunjungan dinas ke sini tanpa Lurah dan Camat, bahkan tanpa pegawaku, aku kunjungi juga Arni.” (Brata:39).

Pemasokan wanita-wanita untuk pejabat memberikan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Pihak mucikari akan mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan untuk kelancaran usahanya sedangkan pejabat akan mendapatkan pelayanan yang istimewa. Sudah menjadi rahasia umum kalau kunjungan pejabat identik dengan wanita penghibur, praktek seperti ini sudah berlangsung sejak lama. Bukan hal aneh lagi bahwa kunjungan pejabat identik dengan “wanita” (*Jawa Pos*, 24 Juni 2004).

Pelacuran di Indonesia sangat dilarang dan dianggap berdosa terutama karena rakyat Indonesia adalah rakyat yang beragama. Namun sekeras apapun itu, pelacuran di Indonesia terus berkembang. Secara resmi, hukum dan perundangan tentang pelacuran di Indonesia masih sangat membingungkan. Setiap kota

memiliki persepsi dan kebijakan tersendiri mengenai hal ini. Akibatnya tiap-tiap kota memperlakukan pelacur dengan cara yang berbeda. Praktek pelacuran di Indonesia bertentangan dengan sumber hukum di Indonesia, yakni Pancasila terutama sila pertama dan kedua. Seturut dengan sumber hukum ini, Dinas Sosial RI (1984) pun telah menetapkan bahwa pelacuran bertentangan dengan nilai sosial, norma, dan moral agama karena dianggap merendahkan martabat manusia.

Agama memperbolehkan manusia untuk mendapatkan kepuasan seks melalui lembaga pernikahan tetapi melarang perzinahan sebagai perbuatan dosa, maka berhubungan seks dengan orang banyak, seperti yang dilakukan pelacur dapat dikategorikan sebagai dosa besar. Dosa perzinahan, menurut agama Islam, adalah nomor dua setelah dosa menyembah selain Allah. Islam lebih membolehkan pria menikahi empat perempuan sekaligus daripada berzina dengan pelacur. Karena pelacuran dianggap perilaku yang tidak tepat dan melawan norma sosial, maka pelacur di Indonesia disebut wanita tuna susila (WTS) yang secara harafiah berarti perempuan yang tidak bermoral, atau perempuan bermoral rendah (Murray, 1991)

Ada kesenjangan realitas dan idealitas dalam menetapkan status pelacur dalam sistem hukum Indonesia. Hukum sipil Indonesia tidak menyebutkan hukuman untuk pelacur secara eksplisit, yang jelas hanyalah untuk mucikari dan perzinahan. Hukum sipil melarang praktek mucikari dan perzinahan. Sunindyo dan Sabaroedin mengutip tentang hukum Indonesia yang menyebutkan hukuman bukan untuk pelacur tetapi bagi: (a) laki-laki dan perempuan yang memperoleh sumber penghasilan dari pelacuran dan yang secara sengaja mempermudah praktek



pelacuran atau perzinaan, dikenakan pasal 506; (b) mereka yang terlibat dalam perdagangan perempuan, dikenakan pasal 279 dan (c) mereka yang bertindak sebagai sponsor bagi pelacur dan memainkan peran penting dalam mencari pelanggan bagi pelacur dan yang memperoleh keuntungan dari tindakan itu, akan dikenakan pasal 296. Tetapi dalam kenyatannya hukum hanya menindak pelacur.

Ketidakjelasan hukum juga tampak pada peraturan yang berbeda di beberapa kota di Indonesia. Misalnya, di Kabupaten Bantul, polisi menangkap seorang pelacur kelas bawah yang sedang berpraktek. Ketika diajukan ke pengadilan, dia dijatuhi hukuman selama 30 hari dalam penjara perempuan. Sedangkan pelacur di daerah Yogyakarta, beberapa pelacur kelas menengah yang berpraktek di motel-motel ditahan polisi dan dibebaskan dengan dikenakan denda sebesar 7.500,00. Ada suatu diskriminasi dalam hukum terhadap strata pelacur kelas rendah dengan pelacur kelas menengah. Pelacur kelas menengah yang notabene lebih mudah mendapatkan uang hanya dikenakan hukuman ringan dan dapat digantikan dengan denda yang relatif terjangkau tetapi bagi pelacur rendah akan mendapatkan masa tahanan yang lama, atau dikenakan denda diatas kemampuan mereka (*Jawa pos*, 25 Juni 2004).

Keadaan yang memprihatinkan adalah pelacur rendah yang melakukan praktek dipinggir jalan atau di lokasi liar, mereka lebih sering disebut sampah masyarakat dan dianggap mengotori keindahan kota. Pelacur-pelacur jenis ini selalu diburu dan ditangkap untuk dipenjara tetapi belum pernah ada upaya signifikansi dari pemerintah untuk menyejahterakan mereka sebagai tindak lanjut dari penangkapan atau pemenjaraan. Perbedaan yang terjadi seperti contoh yang

di atas, pada dasarnya juga dipengaruhi oleh setiap kota atau daerah memiliki kebijakan dan aturan yang berbeda dalam menangani masalah pelacuran. Ambivalensi kebijakan dan hukum tentang pelacuran terjadi di Indonesia.

Memberantas pelacuran harus diimbangi dengan pemikiran perekonomian rakyat yang hidup didalamnya seperti penjual makanan, tukang parkir dan sebagainya. Mereka hidup dengan mengandalkan dari pengunjung yang datang setiap harinya ke lokasi dan penghuni tetap lokasi itu sendiri. Upaya yang dilakukan hanyalah meminimalisirkan keadaan yang demikian karena bagaimanapun juga pelacuran tidak sepenuhnya membawa dampak positif, dan kita tidak ingin bangsa ini memiliki moral yang rusak karena pengaruh prostitusi.

Keberadaan salon-salon dan panti pijat yang ditengarai sebagai bentuk pelacuran terselubung yang juga meresahkan masyarakat, salon dan panti pijat semata-mata hanyalah kedok yang dipakai pemilik usaha untuk menjalankan aktifitas seksual. Mereka juga menyediakan layanan plus bagi pelanggan laki-laki. Saat ini tempat mesum terselubung mulai menjamur di Surabaya, dengan menggunakan kedok salon kecantikan atau panti pijat dapat kita jumpai di sepanjang jalan kedungdoro, kawasan Darmo Park, Jl. Tunjungan, serta di Jl. Kertajaya. Kedua tempat mesum itu memiliki modus yang sama yaitu dengan “tembak” di tempat atau dipanggil ke hotel. Lokasi terselubung seperti salon dan panti pijat berada di luar lokasi (*Jawa Pos*, 24 Juni 2004).

Dulunya tidak sulit untuk membedakan antara panti pijat sungguhan dengan panti pijat syahwat. Ciri sederhana yang dijadikan patokan adalah seragam, jika gadis pemijatnya berseragam, pertanda tidak disediakan layanan

seks di dalam panti pijat. Para pemijat rata-rata menolak untuk diajak 'main' di dalam panti pijat. Tapi seragam kerja ini tidak selalu mencirikan sebagai panti pijat sungguhan. Sebab saat ini banyak panti pijat mesum yang mempekerjakan gadis-gadis pemijat dengan berseragam.

Seperti yang terdapat disalah satu ruko Darmo Park Jl. Mayjen Sungkono, meskipun berseragam pemijatnya terang-terangan menjual layanan seks. Mula-mula gadis pemijat ini menjalankan tugasnya yaitu memijat tamu yang memilihnya sendiri, dengan siapa ia akan dipijat. Setelah beberapa menit pijatnya berhenti dan mulai merayu untuk menawarkan layanan lainnya yaitu bermain cinta. Cara kerja seperti ini sama persis dengan salon kecantikan yang menyediakan layanan Syahwat.

Pemerintah kota Surabaya belum menindak tegas, aksi-aksi salon dan panti pijat liar yang tidak memiliki ijin berdiri. Peran serta pemerintah kota terhadap maraknya bisnis ini, dengan memberikan ijin berdiri merupakan bentuk dukungan dan perlindungan terhadap bisnis seks terselubung. Tetapi pemerintah kota mengeluarkan aturan untuk panti pijat resmi. Berdasarkan SK Wali Kota nomor 2/2004, panti pijat resmi harus memiliki beberapa persyaratan, yaitu lokasinya tidak boleh dekat dengan tempat ibadah dan sekolah. Dengan fasilitas minimal lima ruangan pijat dengan luas minimal 5 meter persegi. Setiap ruangan dipisahkan dengan kelambu, bukan pintu permanen. Ukuran kelambu maksimal 90 persen dari lebar daun dan bawahnya harus berjarak 40 centimeter dari lantai.

Setiap ruang pijat hanya terdiri satu tempat tidur untuk pijat (single), lebar 1 meter dan tinggi minimal 1 meter. Kamar mandi terpisah dengan ruang pijat,

steam minimal untuk dua orang. Peraturan-peraturan itu tidak sepenuhnya dijalankan oleh pengelola panti pijat. Mereka justru menciptakan ruang *privacy* bagi pelanggan. Di bawah ini terdapat tabel tentang modus-modus dan tarif yang dipakai oleh “panti pijat” serta klasifikasi pelacur.

Tabel modus dan tarif yang dipakai oleh “panti pijat”

- Modus :
  - Berkedok panti pijat tradisional
  - Berkedok salon kecatikan
  - Karaoke dan klub malam
- Tarif Sewa Kamar (Pitrad) :
  - Kelas bawah : Rp 15 ribu – Rp 25 ribu
  - Kelas menengah : Rp 30 ribu – Rp 60 ribu
  - Kelas atas : diatas Rp 60 ribu
- Tips mengenali pijat plus :
  - Pitrat plus : 1. Tidak ada tulisan pijat murni  
2. Ada etalase wanita seperti kawasan dolly
  - Pitrat murni : 1. Ada tulisan pijat murni  
2. Tidak ada etalase tamu diberi foto sebelum dipijat
- Penetrasi :
  - Sampai berhubungan seks
  - Oral seks
  - Onani
- Tarif service plus :
  - Hubungan seks :
    1. Kelas menengah ke bawah : Rp 100 ribu
    2. Kelas menengah : Rp 150 ribu – Rp 300
    3. Kelas menengah ke atas : diatas Rp 300 ribu
  - Oral seks dan Onani :  
Berbeda Rp 25 ribu – Rp 100 ribu dari hubungan seks

## Klasifikasi Pelacur ditinjau dari Jenisnya

Jenis Pelacur menurut:	Klasifikasi Pelacur		
Kelamin	Laki-laki	Perempuan	Waria
Tarif	Atas	Menengah	Bawah
Usia	Dewasa	Remaja (ABG)	-
Tempat Kerja	Kompleks	Bordil / Salon / Panti Pijat	Rumah
Profesionalitas	Profesional	Semi profesional	Amatir
Cara Kerja	Ikut Mucikari	Terkadang ikut Mucikari	Mandiri
Tuntunan Kebutuhan	Uang / Narkoba	Status / Gengsi	Kesenangan
Pendidikan	Terpelajar	Tidak Terpelajar	-

Dari tabel diatas dapat diketahui beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan prostitusi. Tingkat pendidikan ternyata sangat berpengaruh terhadap nilai jual seorang pelacur. Mereka akan dibayar lebih tinggi untuk pelacur yang memiliki pendidikan tingkat perguruan tinggi atau sekolah menengah umum (SMU) daripada pelacur yang hanya keluaran SMP kebawah. Selain itu kemampuan seorang pelacur dalam bermain cinta juga berpengaruh terhadap pembayaran dan pemberian tip oleh pelanggan terhadap pelacur disamping wajah cantik yang menjadi penarik pelanggan. Seorang pelacur memiliki ketrampilan olah seks yang canggih, khususnya teknik yang disebut "*goyang kerawang*" dan "*Gelas mengaduk sendok ala madura*" serta beragam gaya lainnya. Dengan ketrampilan yang dimilikinya tersebut seorang pelacur akan mendapatkan tarif tinggi. Berdasarkan waktu pelayanannya, terdapat dua jenis tarif, yaitu pelayanan singkat (*short time*) sekitar satu sampai dua jam dan pelayanan satu malam penuh (*long time*) yaitu selama 24 jam, akan terkena pembayaran tiga kali lipat dari waktu *short time*.

Persoalan pelacuran salah satunya terkait dengan faktor kemiskinan bangsa. Karena semakin miskin suatu bangsa semakin minim kesempatan dan lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga jalan yang ditempuh adalah dengan melacurkan diri. Kondisi perekonomian bangsa yang sedang mengalami krisis juga berperan meningkatkan jumlah pelacuran. Ketika seseorang dihadapkan pada perekonomian yang sulit, lapangan kerja yang sedikit maka pelarian yang dilakukan adalah dengan melacurkan diri. Mereka berusaha untuk mempertahankan hidup dari himpitan ekonomi keluarga. Seperti yang dilakukan oleh Tumiyah. Ia adalah seorang janda dengan dua anak. Tumiyah harus menanggung hidupnya dan keluarganya yang ada di desa serta Nani dan Ugra anaknya dengan jalan melacurkan diri, rendahnya pendidikan dan ketrampilan yang ia miliki tidak bisa ia pergunakan untuk mencari kerja, akibatnya Tumiyah tersesat hidup di *Kremil* sebagai pelacur. Dari melacur inilah Tumiyah mampu membiayai kehidupan seluruh keluarganya walaupun sedikit.

Elemen penting dalam pelacuran adalah uang dan mata pencaharian. Mereka yang terlibat dalam kegiatan pelacuran demi uang sebagai mata pencaharian. Dengan melacurkan diri mereka memperoleh materi untuk kebutuhan hidupnya. Saat ini tercatat sekitar 75.000 pekerja seks komersial yang berumur di bawah 18 tahun, sekitar 50.000 lebih dinyatakan belum berusia 16 tahun, dan sekitar 150.000 anak berusia 18 tahun keatas (Memorandum, 4 September 2003). Setiap tahun angka ini terus meningkat, seiring krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia.

Masalah pelacuran merupakan problematika bangsa saat ini. Pelacuran bukanlah masalah yang remeh tetapi perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Karena pelacuran merupakan penyakit masyarakat. Berbagai dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pelacuran ini mulai mengkhawatirkan. Meningkatnya jumlah pengidap HIV dan penyakit-penyakit lainnya telah memakan korban jiwa dalam jumlah yang terus meningkat tajam dari setiap tahunnya. Pelacuran seharusnya ditindak tegas atas dasar: (1) pelacur adalah media penyakit menular seksual yang berbahaya, termasuk AIDS, (2) tanpa pelacuran, penularan penyakit AIDS dapat dikendalikan, (3) pelacuran merupakan salah satu bentuk perbudakan seksual terhadap perempuan.

Ada beberapa alternatif yang melatarbelakangi timbulnya pelacuran. Faktor-faktor itu disebabkan oleh kemiskinan, rendahnya pendidikan, rendahnya standar moral manusia serta keinginan untuk memperoleh status sosial (Koentjoro). Diantara faktor tersebut yang utama adalah ekonomi, masyarakat merasa perekonomian bangsa saat ini sedang mengalami krisis. Pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat. Pemerintah disibukkan oleh perebutan kursi kepemimpinan tanpa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Kenaikan harga sembako, BBM, listrik, serta telepon menindas rakyat kecil. Banyaknya perusahaan yang gulung tikar karena tidak mampu mengatasi gejala harga yang melambung tinggi. Sehingga jumlah pengangguran meningkat. Jatuhnya perekonomian bangsa salah satunya juga disebabkan oleh ulah para pemimpin bangsa yang tega melakukan korupsi uang rakyat. Dana yang dikorupsi

itu seharusnya untuk pembangunan rakyat tetapi dialokasikan ke rekening pribadi pemimpin. Tidak mengherankan apabila pelacuran tumbuh dengan pesatnya serta banyaknya kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini.

Faktor lain yang memicu pelacuran adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam atau faktor pribadi manusianya, seperti perasaan putus asa, perasaan dikhianati dan keinginan dalam diri manusia untuk memiliki barang-barang mewah. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah. Kehamilan di luar nikah yang terjadi pada seorang perempuan adalah aib bagi keluarga besar, khususnya orang tua. Oleh karenanya seluruh orang tua memandang rendah anak perempuan semacam ini. Ketidaksiapan dalam menghadapi permasalahan yang kompleks membuat ia memutuskan menjadi pelacur untuk menghidupi dirinya dan anak yang dikandungnya. Jumlah pelacur yang terpengaruh oleh motivasi situasional lebih sedikit dibandingkan dengan pelacur yang dipengaruhi oleh motif ekonomi. Seperti yang terdapat pada kutipan berikut:

“Pulang ke lamongan jalan kaki, kelaparan, tak sadarkan diri di daerah tambak, ditolong oleh orang yang buka kedai di situ. Jadi pembantu. Buka kedai saja kurang cukup penghasilannya, maka pembantu perawan itu dikorbankan untuk melayani laki-laki bernafsu”.

“Maka untuk menembah penghasilan, Maryuni mengorbankan diri menjadi pembantu kedai dalam segala hal. Rela menjadi pelacur muda, dan laku juga, karena belum banyak saingan”. (Brata: 157).

“Ia suka bekerja membantu orang tuanya, menggarap sawah, jual-beli barang bekas, apa saja. Namun kekayaannya tidak bertambah. rumahnya itu-itulah juga. Keluarganya turun temurun ya miskin seperti itu. Umur empat belas tahun sudah



menikah. Sayangnya bukan dengan laki-laki tetangga selingkungannya, melainkan laki-laki dari daerah lain. Belum dikenalnya. Boyani dibawa ke tempat lain, dicerabut dari lingkungan asalnya, dan terasa menjadi orang tidak bebas lagi. Boyani ingin bergaul seperti dulu. Tidak boleh. Dimarahi. Pacar lamanya dimusuhi oleh keluarga barunya. Dibunuh ketika sedang mengunjungi Boyani. Keluarga pacar lama dendam kepada keluarga baru Boyani. Boyani menjadi sebab permusuhan, dan dia terancam dari kedua belah pihak. Sejak itu perdamaian di sekitar hidupnya terganggu. Tertekan oleh kekerasan. Hidupnya dilingkari oleh dendam kesumat. Akhirnya ia berontak. Minggat". (Brata:304).

"Nah, sekarang inilah aku menikmati kebebasanku. Menurutkan kata hati yang dahulu ditekan, dikurung, dijajah orang tua. Di Kremil inilah tempat tempat kebebasan. Terutama yang paling ditekan ibu, yakni perihal jodoh. Ibuku seperti menyodorkan penjara saja untukku. Laki-laki yang akan dijodohkan ibuku adalah buaya darat. Sedang aku anak harimau liar yang punya tenaga kuat untuk berjuang mempertahankan kebebasan. Aku melacur sebagai lampiasan kata hati, berontak terhadap kemauan ibuku memenjarakan daku." (Brata:441).

Dari cerita-cerita diatas, secara tidak langsung mengungkapkan kesaksiannya tentang sebab-sebab timbulnya pelacuran yakni adanya desakan ekonomi, perasaan putus asa, perasaan ditekan dikhianati dan sebagainya. Hampir seluruh pelacur di Indonesia melacurkan diri secara sukarela atas inisiatif pelacur itu sendiri. Hal itu bisa disebabkan karena pengaruh pergaulan bebas atau pelampiasan perasaan yang tertekan dalam keluarga. Seperti yang dialami oleh Ningsih. Ia memilih menjadi pelacur atas kemauannya sendiri, ia merasa menjadi pelacur adalah jalan untuk memperjuangkan hak hidupnya dan menemukan kebebasan yang selama ini terkekang oleh keluarga, seperti yang terdapat dalam kutipan berikut ini.

"Ayahnya masih saja dihinggapi pola pikir lama yang sama. Pola pikir yang benar-benar telah dipahami oleh Ningsih, dan

sekaligus pola pikir itu yang telah mendera Ningsih semenjak kecil hingga akhirnya harus minggat dari rumah ayahnya di Putroagung. Ningsih minggat gara-gara sudah tidak betah lagi menderita tekanan kemauan ibu dan ayahnya sepanjang hidupnya. Ia minggat karena ingin mereguk kenikmatan untuk sisa hidupnya yang telah dewasa ini". (Brata:473).

Disamping itu adanya komersialisasi seksual, bertemunya budaya asing dengan budaya setempat, terjadinya dekadensi moral dan tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran, dikatakan sebagai peristiwa sosial yang turut menjadi penyebab timbulnya pelacuran. Peran turisme sebagai sumber pendapatan devisa negara-negara berkembang, seperti Indonesia mempunyai andil besar dalam melahirkan pelacuran. Walaupun dalam pembangunan industri turisme tidak dirancang untuk pelacuran, dan tidak semua turis melakukan perjalanan dengan motivasi untuk mendapatkan pelayanan seksual dari pelacur.

Namun demikian, maraknya pelacuran di sekitar pusat turisme adalah fakta. Seperti yang terjadi pada pulau Batam dan Bali, yang terkenal dengan turisme seksnya. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan antara pelacuran dengan turisme. Keberadaannya sebagai penghasil devisa seringkali dimanfaatkan pemerintah untuk mendukung turisme sebagai strategi untuk pembangunan ekonomi. Turisme di negara ketiga seperti Indonesia merupakan bentuk aktivitas wisata yang lebih menarik bagi turis negara maju. Karena di sana disediakan beragam hiburan yang murah serta gaya hidup yang tidak bisa diperoleh di negara asal. Turisme menjadi rekreasi massa dan komoditas bagi pemerintah untuk memperoleh dana dan sumber hiburan.

Konsekuensi dan dampak turisme bagi pelacuran mempunyai makna bahwa perempuan dan anak-anak yang tinggal di daerah turisme seringkali

digunakan sebagai alat eksploitasi seks. Permasalahan turisme harus dipandang dalam konteks yang lebih luas, terutama dampak negatif hilangnya harga diri manusia disertai hilangnya kepemilikan tanah, eksploitasi serta degradasi perempuan dan anak-anak. Pembangunan turisme harus disertai oleh pembangunan yang mendukung komunitas dan budaya penduduk asli untuk menghindari dampak negatif.

Masalah pelacuran merupakan masalah yang kompleks, sastrawan sangat menyangkan sikap sebagian masyarakat yang memvonis para pelacur sebagai orang yang bermental rapuh, lemah iman, dan sebagainya, tanpa berusaha memahami sebab-sebab mereka menerjunkan diri keduniannya. Membicarakan pelacuran bukan hanya berbicara masalah kebaikan-kebaikan atau dosa, tetapi juga berbicara tentang realitas. Membicarakan pelacuran tidak hanya dilihat dari sisi negatifnya saja, tetapi harus dilihat pula sisi-sisi lain yang menyebabkan, serta alternatif dan penyelesaian yang tidak merugikan salah satu pihak. Sangat disayangkan sikap sebagian masyarakat yang secara apriori terlanjur menganggap pelacur sebagai orang-orang yang hina yang harus dikucilkan, masyarakat umum menganggap pelacur sebagai sampah masyarakat. Mereka tidak mau hidup berdampingan dengan pelacur dengan alasan takut tertular penyakit yang disebarkan oleh pelacur. Hal seperti ini terlihat jelas ketika terjadi kematian terhadap salah satu pelacur di kampung *Kremil*. Penghuni *Kremil* merasa kesulitan untuk mendatangkan rohaniawan atau sukarelawan untuk membantu penguburan seperti dalam kutipan berikut ini.

“Kampung kita kampung Kremil, bukan Kauman atau Pasturan. Mencari rohaniawan tukang baca doa pasti susah.

Meskipun tugas rohaniawan adalah menyembuhkan penyakit rohani manusia seperti kita, tetapi mereka tidak berani mendekati kita, khawatir justru mereka yang ketularan penyakit kita. Karena penyakit kita adalah penyakit kemanusiaan, sedang mereka juga manusia rentan penyakit rohani. Bagi mereka lebih aman campahkan saja orang-orang seperti kita jauh-jauh. Tugas mereka aman. Bisa berjumawa. Bisa berkhotbah leluasa, mendapatkan penggemar dan pengagum, dipuji-puji dan tenar. Tanpa kita, mereka merasa amat berhasil mempengaruhi masyarakatnya. Bersama kita, mereka akan kerepotan memusuhi penyakit kemanusiaan.” (Brata:711).

Pelacur juga membawa pengaruh buruk terhadap mental seseorang karena itu mereka tidak ingin terpengaruh bermental rusak. Persoalan yang memojokan pelacur adalah pelacuran seringkali dianggap membahayakan kepribadian seseorang, memperburuk kehidupan keluarga dan pernikahan, menyebarkan penyakit, dan mengakibatkan disorganisasi sosial. Pelacur acapkali disalahkan karena dianggap sebagai biang keretakan keluarga. Pelacur juga dimusuhi kaum agamawan dan dokter karena peran mereka dalam menurunkan derajat moral dan fisik kaum pria serta menjadi bibit perpecahan anak-anak dari keluarganya (Parker,1991).

Selain itu sikap sinis dan jijik juga ditujukan kepada pelacur. Seorang pelacur selalu mengalami konflik negatif dalam diri mereka, merasa kotor, berdosa dan ingin meninggalkan profesi meskipun pada saat yang sama mereka merasakan tingginya kebutuhan akan uang untuk memenuhi segala kebutuhannya. Mereka adalah manusia juga sama seperti kita.

“Kamu harus menyadari, kita ini hidup di Kremil, kampung maksiat, tempat sampah masyarakat.....Mereka takut ke sini khawatir ketularan, karena kita ini penyakit masyarakat, tempat sipilis. Mereka mencampakkan kita, menghina kita, membuang kita,

tak mau menoleh kepada kita. Ya, mereka cenderung membuang kita jauh-jauh dari tempatnya daripada ingin menolong membawa kita ke tempatnya, ke masyarakatnya. Itu lumrah, Ti, itu lumrah! Kita jangan berharap hidup bersama dan seperti mereka! Tidak! Kita beda. Derajat kita rendah dibanding dengan mereka. Andaikata kasta, kasta kita paria.” (Brata:709).

Kutipan diatas bukti terhadap perlakuan masyarakat terhadap pelacur. Pendiskriminasian tersebut diungkapkan oleh Suparto Brata dalam novelnya sebagai ajang untuk mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap masyarakat terhadap wanita tuna susila sekaligus menyadarkan kita bahwasanya kita semua memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan.

Walaupun muncul banyak penolakan sosial terhadap pelacuran disebagian besar masyarakat kita, namun masih ada pihak yang menganggap pelacuran sebagai suatu praktek yang masih perlu dilakukan di dalam masyarakat demi kontrol sosial. Dalam hal ini terdapat pendapat dari sebagian kecil masyarakat diluar pelacuran yang mengatakan bahwa pelacuran telah menjadi sebuah kebutuhan, sebab tanpa pelacuran dan rumah-rumah bordil laki-laki akan mudah menjadi makhluk garang yang setiap saat bisa saja memperkosa perempuan di jalan.

Para pelacur umumnya dianggap sebagai orang-orang yang lemah mental dan imannya. Mereka dianggap telah melanggar norma-norma sosial dan agama. Mereka menerjuni dunia pelacuran karena tidak ada lagi alternatif lainnya untuk menunjang dan mempertahankan hidup selain melacurkan diri. Mereka sesungguhnya adalah korban dari oknum-oknum tertentu yaitu para mucikari dan laki-laki hidung belang yang memanfaatkan mereka dan mengeksploitasi potensi

fisik mereka demi kepentingan-kepentingan pribadinya sehingga para pelacur-pelacur tersebut sulit untuk melepaskan diri dari dunia yang terlanjur digelutinya.

Kenyataannya kehidupan para pelacur umumnya terikat dengan mucikarinya yang menentukan tarif hingga mengatur segala kegiatan anak semangnya. Sebagai imbalannya para pelacur harus merelakan sebagian hasil kerjanya untuk dipotong dan diberikan kepada mucikarinya. Hubungan antara mucikari dan anak semangnya terjalin sangat dekat, mereka berdua bekerjasama untuk mendapatkan pelanggan. Para mucikari berupaya untuk selalu mempromosikan setiap anak semangnya dengan kelebihan masing-masing, menghiasai tempat usaha mereka sebaik mungkin dan menjaga kesehatan anak semangnya dengan jalan mendaftarkan ke puskesmas untuk diberikan suntikan secara teratur. Semua ini dilakukan oleh seorang mucikari kepada anak semangnya demi kebaikan mereka bersama. Oleh karena itu sifat keterkaitan tersebut yang menjadikan para pelacur sulit untuk melepaskan diri.

“Persoalannya bukan begitu. Persoalannya para mucikari di sini melaksanakan tugasnya secara profesional. Lampu-lampu diesel, cat tembok warna-warni, lagu-lagu yang diputar selalu menggema lembut, perempuan yang selalu bersolek, semua kegiatan itu tujuan utamanya bukan menata tempat ini menjadi tempat kediaman orang berbagai pekerjaan atau mata pencaharian.” (Brata:33).

“Para mucikari berkeleajiban mendaftarkan anak buahnya dan memerintahnya untuk secara teratur suntik pada dokter menurut kelompok masing-masing. Katanya agar badan mereka sehat, dan kalis oleh penyakit perempuan.” (Brata:182).

Keadaan ini juga didukung oleh faktor permintaan akan pelacur-pelacur baru yang masih muda dan cantik. Faktor permintaan ini datang dari sektor

turisme, mobilitas orang, dan perubahan sosial. Selanjutnya faktor persediaan yang mendorong wanita ke dalam pelacuran adalah sikap terhadap pernikahan, motif untuk memiliki, budaya, dan kepercayaan, seperti hegemoni laki-laki yang mendorong anak-anak atau istri mereka menjadi pelacur. Dan terakhir faktor perantara yang memfasilitasi makin majunya pertumbuhan pelacuran di Indonesia. Peran utama mereka adalah menterjemahkan permintaan akan pelacur di wilayah perkotaan. Faktor permintaan dan faktor persediaan dapat saling memenuhi dengan baik karena peran penghasut (instigator).

Penghasut berperan sebagai penyalur dan penyedia. Dalam merekrut bibit baru sebagai pelacur, penghasut biasanya mencari gadis-gadis desa yang ingin bekerja di kota. Mereka dididik terlebih dahulu bagaimana melayani tamu sampai mereka siap dan di pertemukan dengan calon mucikari atau pelanggan. Namun tidak sedikit para penghasut ini menipu korban, dengan dalil akan mencarikan kerja di kota sebagai penjaga toko atau pembantu rumah tangga tetapi mereka justru dijadikan budak nafsu seks. Seperti yang dilakukan oleh Sueb terhadap Suyati, ia menjanjikan pekerjaan kepada Suyati sebagai pembantu rumah tangga tetapi justru Suyati dititipkan di rumah bordir Bu Tiny.

“Anu, Tante. Ini adik saya dari desa, mau cari pekerjaan di Surabaya. Karena dia belum pernah kenal Surabaya, maka untuk sementara saya antar ke sini. Dia ini lulusan SR. Maksudnya mau jadi pembantu rumah tangga. Nanti akan saya carikan pekerjaan. Tapi sementara saya titip dulu di sini Tante.”

“Bu Tinny sudah membaca gelagat keuntungan di pihaknya, segera saja sikapnya menjadi ramah. Meskipun dandanannya Suyati begitu dusun, tetapi wajahnya yang bulat telur, serta buah dadanya yang menonjol di balik baju merahnya yang lusuh sudah mengisyaratkan bakal jadi sumber uang yang banyak menarik pelanggan.” (Brata:4).

Dalam menyalurkan permintaan dan persediaan pelacur, penghasut cenderung bekerja dengan tiga cara, yaitu (1) Menjadikan mantan pelacur yang sukses sebagai contoh sosialisasi. Dengan sengaja memamerkan kekayaan yang berhasil dia kumpulkan sebagai pelacur dengan demikian akan timbul keinginan bagi gadis-gadis lainnya untuk terjun ke dunia prostitusi; (2) mencoba untuk mempengaruhi para orang tua dan perempuan dengan iming-iming materi yang berlimpah yang dapat meningkatkan status ekonomi mereka; (3) penghasut sebagai jembatan antara permintaan dan persediaan dengan cara membuka saluran permintaan dan menjaga persediaan (*Jawa Pos*, 15 Mei 2003)

Dalam menghadapi masalah pelacuran pemerintah pusat memberikan kekuasaan otonomi untuk mengatur permasalahan yang ada di wilayahnya sehingga peraturan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan masalah prostitusi berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pada jajaran yang lebih rendah dari birokrasi pemerintah ini, banyak peraturan yang secara keseluruhan dibuat oleh para pejabat pemerintahan setempat yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelacuran, misalnya peraturan tentang larangan perdagangan seks, peraturan imigrasi, dan peraturan yang mengharuskan warga untuk melaporkan perubahan tempat tinggal kepada pejabat pemerintah setempat, serta peraturan bagi tuan rumah untuk melaporkan tamu yang menginap lebih dari sehari.

Semua peraturan ini digunakan semata-mata hanya untuk mencegah dan mengendalikan keberadaan prostitusi. Peraturan-peraturan ini merupakan refleksi dari peraturan pemerintah pusat yang tidak diumumkan, terutama yang menyangkut pelacur jalanan yang dianggap menghambat kebersihan dan

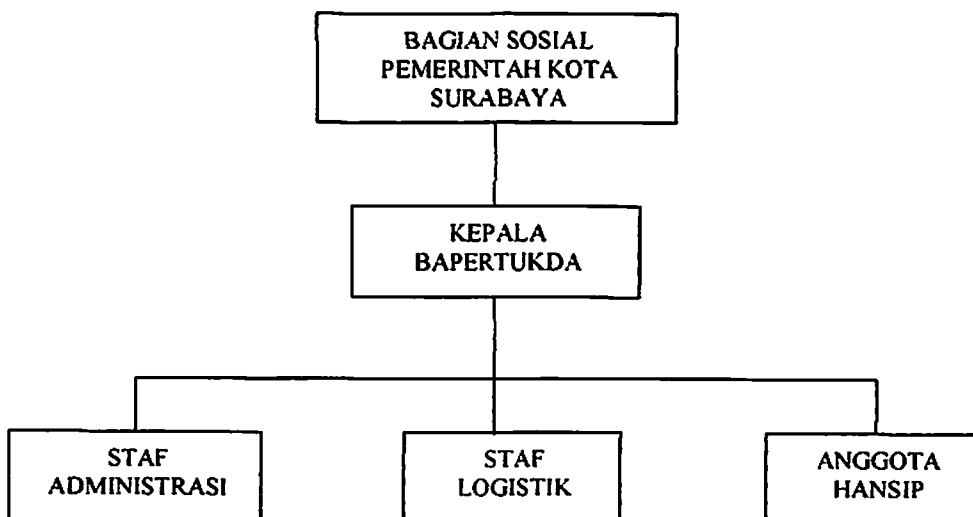


ketertiban kota. Pemerintah Kota Surabaya juga menerapkan peraturan, kebijakan serta langkah-langkah nyata yang sifatnya tindakan preventif maupun refresif. Pemerintah kota Surabaya membuat struktur organisasi dari Badan Pelaksana Rehabilitasi Tuna Karya Daerah (Bapertukda), yang terkait dengan pelacuran. Tugas Bapertukda antara lain:

- a. Membantu Walikota Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan penanganan terhadap para gelandangan, pengemis, orang gila (Psikotik), orang lanjut usia atau jompo yang terlantar dan tidak memiliki keluarga.
- b. Menjaga ketertiban Kota Surabaya dari adanya pelanggaran ketertiban di jalan-jalan protokol, lampu merah, dan perempatan jalan serta tempat umum lainnya yang biasa dilakukan oleh para gelandangan, pengemis, Wanita Tuna Susila, orang-orang terlantar dan orang gila (Psikotik).

Sedangkan susunan struktur organisasi dari Bapertukda itu sendiri terdiri dari beberapa staff yang terbentuk dalam struktur di bawah ini.

#### Susunan Struktur Organisasi Bapertukda



Selain Bapertukda, ada Bimbingan Masyarakat (Bimmas) Polwiltabes Surabaya yang fungsinya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini dan masa yang akan datang, serta mengambil tindakan tegas dalam menghadapi penyakit masyarakat yang meresahkan termasuk pelacuran, narkoba, ekstasi, alkoholisme, serta perjudian. Namun kenyatannya, aparat dan penegak hukum dinilai terlalu lemah dalam menindaklanjuti pelaku, hal ini disebabkan lemahnya mental aparat terhadap sogokan, hukum bisa saja dibeli oleh oknum-oknum yang berkuasa dan memiliki uang. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila penyakit masyarakat ini sangat sulit diberantas. Tidak mudah membersihkan kotoran apabila sapu yang digunakan juga kotor.

#### **4.2 Relevansi Peristiwa dalam novel *Kremil* dengan Realitas sosial di Masyarakat**

Selain mengemukakan berbagai permasalahan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat, berbagai kritik sosial juga dapat ditemukan di dalam novel *Kremil* ini. Kritik-kritik sosial ini merupakan bagian dari problematika yang ingin pengarang sampaikan kepada pembaca.

##### **4.2.1. Kritik Sosial terhadap Korupsi dalam Novel *Kremil***

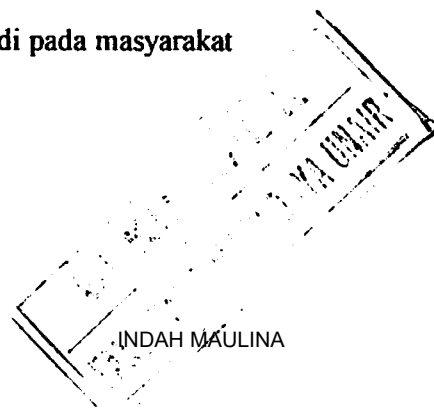
Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, korupsi merupakan penyakit akut dan sampai saat ini belum ada obat yang efektif untuk menyembuhkannya. Sejahrawan Ong Hok Ham menyebutkan bahwa korupsi sebagai suatu penyimpangan . birokrasi memang hampir terjadi di seluruh negara, tetapi

fenomena korupsi yang terjadi di negara berkembang, khususnya Indonesia, jauh lebih rumit karena telah menjadi sesuatu yang sistematis.

Sebenarnya benih korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagai bentuk pelanggaran hukum jabatan negeri, sudah mulai disemai sejak awal Republik, bahkan jauh sebelum itu. Sejarah mencatat bahwa keruntuhan kongsi dagang VOC di akhir tahun 1799, tidak lain disebabkan oleh korupsi yang meradang di lembaga tersebut.

Dalam perjalanan sejarahnya, negeri bekas koloni VOC ini selalu mengidap persoalan penyalagunaan kekuasaan, korupsi, dan nepotisme. Bedanya korupsi yang terjadi pada jaman kolonial dan pada awal masa republik hanya menjadi masalah elit politik, sedangkan pada masa-masa selanjutnya korupsi telah menjelma menjadi virus birokrasi dari tingkat tertinggi hingga tingkat desa, dari sektor publik hingga privat. Ada perbedaan praktek korupsi yang terjadi pada jaman dahulu dengan sekarang. Dulu ketika jaman Soekarno korupsi masih di bawah meja karena masih malu-malu. Ketika jaman Soeharto korupsi dilakukan di atas meja. Memasuki pemerintahan Megawati korupsi tidak saja di atas meja, tetapi sampai meja-mejanya juga dikorup karena sudah amat terbuka dan tanpa malu-malu.

Beberapa sendi yang dinilai paling rawan terhadap praktek korupsi adalah partai politik, kepolisian, dan pengadilan. Sementara kecenderungan masyarakat memberikan suap paling banyak terjadi di sektor konstruksi, pertahanan keamanan, migas, perbankan, dan properti. Korupsi telah menjelma di segala bidang kehidupan, tidak menutup kemungkinan korupsi bisa saja terjadi pada masyarakat



pinggiran, seperti dalam kehidupan di lokalisasi. Dalam novel *Kremil*, dapat dijumpai adanya praktek korupsi yang dilakukan oleh tokoh Prali. Dokterandus Prali melakukan penggelapan terhadap dana untuk pemotretan pembangunan. Prali terjerat perkara pemalsuan tanda tangan Sekda untuk mengeluarkan dana proyek yang telah dianggarkan.

“O, iya! Dia kena perkara. Ditahan polisi karena memalsu tanda tangan Sekda untuk mengeluarkan dana proyek yang telah dianggarkan. Proyek pembangunan di seluruh Kotamadya, kalau tidak salah. Pencairan dananya telah enam bulan yang lalu baru terungkap sekarang.” (Brata:513).

“Drs. PI. S, siapa? Prali. S? Tahun lalu menyelenggarakan pameran foto pembangunan di Balai Pemuda. Dia memesan foto-foto ukuran besar yang dipamerkan itu kepada seorang wartawan, Utoro atau siapa namanya, aku lupa, tetapi juga teman Dik Basuki. Pesanan foto itu sampai seharga delapan puluh ribu rupiah. Sudah enam bulan lewat, tidak juga dibayar. Hingga wartawan foto tadi jengkel. Lalu memuat surat pembaca di surat kabarnya sendiri, mencantumkan objek tagihan pameran foto pembangunan itu.” (Brata:513-514).

Berita tentang Prali banyak mendapatkan sorotan dari berbagai surat kabar. Tahun lalu Prali menyelenggarakan pameran foto pembangunan di Balai Pemuda. Dia memesan foto-foto ukuran besar yang dipamerkan tersebut dari seorang wartawan yang bernama Untoro. Pesanan foto itu sampai seharga delapan puluh ribu rupiah. Nilai yang cukup besar pada waktu itu. Namun sudah enam bulan, belum juga dibayar oleh Prali. Sehingga hal itu membuat wartawan foto tersebut jengkel. Lalu memuat surat pembaca di Surat kabarnya sendiri, dengan mencantumkan objek tagihan pameran foto pembangunan itu. Dari suara pembaca tersebut akhirnya perbuatan Prali terbongkar. Salah seorang pegawai bagian

keuangan Kotamadya telah membacanya dan dia langsung menanyakan tentang kebenaran surat itu kepada teman yang mencairkan anggaran. Ternyata Surat-surat pembayaran telah dicairkan oleh Prali. Dengan mengusut kebenaran surat pencairan tersebut kepada Sekda, yang telah menandatangani maka terungkaplah perbuatan Prali selama ini. Sekda tidak pernah merasa membaca pengeluaran surat untuk dana pemotretan apalagi menandatangani. Ternyata tanda tangan tersebut palsu.

Keberadaan Prali sebagai pelaku korupsi merupakan salah satu bukti bahwa korupsi dapat dengan mudah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dalam suatu instansi pemerintahan, walaupun tidak menutup kemungkinan dapat saja terjadi pada masyarakat biasa. Sebagai pelaku tindak korupsi, Prali merasakan bahwa apa yang telah ia terima selama ini dianggap masih kurang olehnya. Terlebih dengan gaya hidupnya yang suka berfoya-foya menuntutnya untuk mendapatkan uang tambahan. Hal ini juga dipicu oleh bujukan rayu seorang wanita simpanan Prali untuk menafkahnya.

“Sudah tiga bulan ini kupelihara.”

“Kau pelihara?”

“Ya. Kuberi uang belanja, dan meskipun tidak tentu harinya sedikitnya seminggu sekali aku pulang ke sini.” (Brata:59).

“Prali membutuhkan perempuan yang hangat, teduh, remang-remang, warna-warni. Tidak ada dipergaulan kantor. Prali memang belum pernah bicara jelas tuntas, bahwa telah menemukan perempuan seperti itu. Belum. Tapi lewat sindir seloroh, tentunya Basuki tanggap juga tentang hal ini. Bahwa perempuan yang dibutuhkan telah ditemukan di Kremil, pada diri Tumiyah. Dan hari ini Prali mau buka kartu, memperkenalkan Basuki dengan perempuan penghangat hatinya. Dengan bangga diri.” (Brata:62).

Salah satu penyebab Prali melakukan korupsi karena pengaruh Tumiyah simpanannya yang selalu menuntut materi secara berlebihan. Tumiyah sendiri adalah wanita penghibur yang hidup dan tinggal di *Kremil*. Dia mempunyai dua anak Nani dan Ugra yang tinggal di desa bersama keluarga Tumiyah. Sifat Tumiyah yang materialistis berusaha untuk mendapatkan tunjangan dari kekasihnya Prali.

“Tapi, begitulah yang terjadi. Terserah apa kata orang masing-masing. Kisah cinta pejabat muda pada Tumiyah telah beredar di warung Bu Tinny. Korban harta telah bercucuran, sepadan keringat yang keluar dari keringat perempuannya. Kunjungan pejabat muda yang mewakili Walikota bernama Dokterandus Prali Sudibyo terus berlangsung dengan aman, tenang, sukaria, dan penuh nafsu birahi.” (Brata:85).

Karena rayuan Tumiyah tadi membuat Prali tergoda untuk melakukan korupsi di tempat kerjanya. Dengan memanfaatkan posisinya sebagai seorang pejabat penerangan di Kotamadya Surabaya. Prali tidak mengalami kesulitan dalam melakukan aksinya untuk memalsukan tandatangan guna mendapatkan dana pemotretan pembangunan di Kotamadya.

Tetapi perbuatan Prali ini terbongkar yang disebabkan oleh sikap sembrono dan cenderung menyepelkan seorang wartawan yang dianggapnya tidak dapat berbuat apa-apa. Prali selama ini menganggap Utoro sebagai seorang wartawan Kroco yang tidak memiliki kedudukan dalam pemberitaan, hanya bisa mencuci cetak foto saja. Prali menganggap lemah posisi Utoro, tidak berbahaya kalau ditunda-tunda pembayaran fotonya. Tetapi Prali salah dalam menilai kedudukan seorang, hal itu justru menjadi bumerang bagi Prali. Utoro telah

membeberkan rahasia Prali dalam surat kabar. Sejak saat itu Prali resmi menjadi tersangka atas kasus penggelapan dana pembangunan.

Sosok Prali sebagai oknum pelaku korupsi merupakan cerminan dari dunia nyata seperti yang terjadi pada kasus korupsi terbesar yang dialami oleh Bangsa Indonesia yaitu korupsi BAPINDO yang dilakukan oknum Edy Tansil dengan menggelapkan dana sebesar 1,3 triliun. Perbuatan Prali ataupun Edy Tansil merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak bertanggung jawab. Perbuatannya ini berimbas pada rakyat kecil. Negara sangat dirugikan dengan perbuatan yang mereka lakukan. Pengurangan dana pemerintah ke rekening masing-masing pejabat membuat Indonesia miskin. Nilai tukar rupiah melemah karena investor asing ragu untuk menanamkan sahamnya ke Indonesia. Akibatnya rupiah terpuruk pada posisi yang lemah, laju ekonomi tersendat, pembangunan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Lebih memprihatinkan lagi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa menjadi korbannya.

Korupsi sebenarnya tidak terbatas pada korupsi uang saja, tetapi juga mencakup korupsi waktu, korupsi kesetiaan, korupsi informasi dan sebagainya. Dalam novel *Kremil*, kasus korupsi ini digambarkan secara jelas dalam peristiwa-peristiwa pelakunya. Seperti yang ditunjukkan oleh pejabat-pejabat kotamadya dalam novel *Kremil* berikut ini:

“Bekerja sebagai pegawai negeri paling besar kesempatannya untuk melakukan korupsi. Setidaknya korupsi waktu. Pekerjaannya longgar, tenaga dan pikirannya tidak tertekan ketat bisa digunakan untuk mencari rezeki yang lainnya di luar dinas.”(Brata:208).

Korupsi waktu adalah jenis korupsi yang paling banyak dilakukan oleh pejabat beserta aparat-aparatnya yang berada dalam instansinya. Sebagai contoh pada pegawai negeri, mereka sangat rentan untuk korupsi jam kerja. Pegawai negeri di Indonesia kurang mendapat ketegasan dalam jam kerja yang seharusnya mereka patuhi. Pegawai negeri biasanya masuk kantor jam delapan pagi tetapi tidak sedikit dari mereka yang terlambat hingga satu jam lebih. Selanjutnya mereka juga sering melakukan kunjungan-kunjungan yang bukan tugas kantor. Tidak jarang juga mereka langsung pulang setelah melakukan kunjungan tersebut. Mereka enggan untuk kembali ke tempat kerja seperti yang biasa dilakukan oleh Dokterandus Prali dan Insinyur Soleh. Mereka sering melakukan kunjungan-kunjungan pada jam kerja ke *Kremil*.

“Pintunya ditutup saja, Dik,” ujar Prali.

“Penunggu parkir mengganggu. Garasi tadi bisa ditempati dua mobil. Namun tidak apalah siang-siang begini ditutup. Nanti sore dibuka, tanda masih terima mobil parkir. Di tempat yang beratap juga ada beberapa sepeda motor parkir. Masih siang, masih sepi. Kalau malam ramai sepeda dan sepeda motor dititipkan di situ. Sekarang ada beberapa sepeda motor. Ada beberapa plat nomor polisinya ditutup dengan kain kotor.” (Brata:30-31).

Kutipan di atas menunjukkan bahwa kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Prali dan teman-temannya itu dilakukan siang hari. Mereka juga tidak mungkin melakukan kunjungan pada malam hari karena para pejabat tersebut ada yang sudah berkeluarga sehingga dia tidak mau kunjungannya itu mengakibatkan kecurigaan istrinya. Sehingga kunjungan-kunjungan ke *Kremil* dilakukan pada siang hari pada jam kerja kantor dengan alasan melakukan peninjauan lokasi pembangunan kota.



“Mengapa kita datang siang-siang, kalau pun mereka belum siap menerima?”

“Walah Bas! Kalau sudah pulang kantor kita kan sulit pergi bersama begini! Kita memang tamu istimewa. Terutama engkau.”

“Aku?”

“Ya. Sekali ini minta diantar. Kemudian hari masuk kompleks sini sendirian, diam-diam, bahkan terhadap aku dan Sholeh saja sembunyi-sembunyi.” (Brata:35).

Belum lagi hari Sabtu, merupakan hari libur untuk pegawai negeri. Dengan keadaan seperti itu, kita maklum apabila Indonesia termasuk negara terbesar dalam hal korupsinya. Mereka tidak dibiasakan untuk berdisiplin. Apalagi tidak ada ketegasan atau sanksi bagi mereka. Meningkatnya jumlah pegawai negeri dengan cepat mengakibatkan gaji mereka menjadi berkurang. Hal ini juga merupakan pemicu untuk melakukan korupsi. Para Pegawai negeri berusaha mencari pendapatan tambahan dengan jalan korupsi. Bertambah luasnya kekuasaan dan kesempatan birokrasi, dibarengi dengan lemahnya pengawasan dari atas merupakan ladang subur bagi korupsi.

Adanya fenomena yang menunjukkan bahwa sistem birokrasi di Indonesia bersifat materialistik. Prosedur dan suasana kerja di kantor-kantor pemerintah berlangsung kaku dan lamban. Hal ini menimbulkan korupsi ‘uang pelicin’. Pada umumnya pemberi uang suap dalam hal ini tidak menginginkan segala sesuatunya dilakukan dengan baik, tetapi mereka menginginkan cepatnya proses berkas-berkas dan komunikasi yang berhubungan dengan berbagai keputusan. Bagian-bagian tertentu yang melakukan tugas tersebut mau mengerjakannya apabila mereka diberi uang sebagai pelicin sehingga segala sesuatu cepat dikerjakan. Ini berarti birokrasi Indonesia hanya mau mengerjakan sesuatu yang ada imbalannya.

pertama, korupsi menyebabkan delegitimasi proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik yang benar, tetapi sebaliknya menimbulkan praktek yang tidak terpuji yaitu politik uang.

Kedua, korupsi mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, membuat tidak adanya akuntabilitas publik, dan menafikan rule of law. Hukum dan birokrasi hanya melayani kepada kekuasaan dan pemilik modal.

Ketiga, korupsi meniadakan sistem promosi dan hukuman yang berdasarkan merit base karena hubungan patron-client dan nepotisme.

Keempat, korupsi mengakibatkan proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan. Dan kelima, korupsi mengakibatkan kolapsnya sistem ekonomi karena produk yang tidak kompetitif dan adanya penumpukan beban hutang luar negeri (Susan Rose dalam Megawati dan Benang Kusut KKN: 5-6).

Tetapi bagaimanapun juga berbahayanya korupsi, orang selalu terdorong untuk melakukan tindakan korupsi. Manusia tidak lagi berpikir sehat, dan cenderung untuk terjerumus dalam kejahatan bernama korupsi. Mereka tidak lagi peduli bahwa akibat perbuatannya itu, akan berimplikasi negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Memang hampir mustahil memberantas praktek korupsi di Indonesia yang telah menggurita di sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Republik Indonesia dalam waktu singkat. Oleh karena itu sungguh merupakan pekerjaan yang berat membawa gerbong pemerintahan semacam itu untuk menguraikan benang kusut

KKN, yang telah “memborok” justru di tubuh pemerintahan dan kabinetnya sendiri. Tidak hanya itu, hampir pasti KKN telah juga menjadi bagian nafas dari alur hidup sistem ketatanegaraan di Indonesia. Memberantas KKN merupakan pekerjaan yang sangat berat. Pemimpin-pemimpin terdahulu pun selalu gagal. Bukan saja gagal melakukannya, tapi tidak jarang justru ikut jatuh karena terbelit isu-isu KKN. Sehingga janji petinggi negeri yang (selalu) memulai masa jabatannya dengan janji akan melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sering hanya retorika dan sangat klise.

Pemberantasan terhadap praktek KKN bukan semata-mata menyangkut masalah teknis hukum saja tetapi menyangkut aspek yang lebih luas lagi yaitu menyangkut masalah ketimpangan sosial, salah urus ekonomi, dan budaya korupsi itu sendiri. Pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum yang berfungsi sebagai jerat bagi kasus korupsi. Dengan dikeluarkannya ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari KKN. Serta UU No 28 tahun 1999 tentang pemberantasan KKN, UU No 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Aparat hukum ini akan berjalan dengan baik apabila semua masyarakat Indonesia ikut berpartisipasi untuk memberantas KKN dan mengawasi setiap langkah pemimpin, sebab bukanlah tidak mungkin apabila pemimpin bangsa saat ini melangkah di jalan yang dilalui pendahuluannya.

KKN memang merupakan masalah yang sangat kronis di Indonesia. KKN bukan lagi sekadar kasus, tetapi sudah merasuk dalam sistem, bahkan nampak

bergerak sebagai sistem itu sendiri. Rasanya hampir setiap unsur yang ada di dalam sistem telah terlibat dalam proses pembiakannya, sehingga yang terlihat adalah upaya berbagai pihak untuk saling memanfaatkan dan saling melindungi.

Untuk membersihkan sistem dari KKN dan penyakit lainnya diperlukan hadirnya kekuatan yang solid, tetapi karena tidak adanya kekuatan besar yang solid, yang memiliki kemauan dan kekuatan yang cukup untuk membongkar sistem. Indonesia tidak kunjung berbenah. Bahkan ketika jaman sudah berubahpun, Indonesia tertinggal dalam masalah penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pada tahun 2003 lalu, Indonesia dinyatakan sebagai negara terkorup di dunia. Dari 133 negara, Indonesia menduduki rangking ke-6 sebagai negara terkorup setelah Angola, Azerbaijan, Kamerun, Georgia, Tajikistan, Myanmar, Paraguay, Haiti, Nigeria, dan Banglades.

#### **4.2.2 Kritik Sosial terhadap Kolusi dalam Novel *Kremil***

Selain kritik terhadap korupsi yang dilakukan oleh pemimpin, kritik sosial juga disampaikan pngarang kepada pemimpin atau pejabat yang juga melakukan kolusi terkait dengan beberapa oknum untuk kepentingan pribadi. Kolusi antara pihak yang berwenang dengan pihak yang memiliki kepentingan tersebut dilakukan atas dasar saling membutuhkan. Pihak yang memiliki kepentingan memerlukan perlindungan hukum atas apa yang dilakukannya, karena biasanya perbuatan mereka melanggar hukum dan bersifat ilegal. Sedangkan tugas pejabat yang berwenang tadi adalah memberikan perlindungan terhadap pihak yang memerlukan perlindungan tersebut dengan membayar atau memberikan apa yang

diminta pejabat tersebut sesuai dengan perjanjian. Maka pejabat tersebut akan menjamin keselamatan pihak yang memiliki kepentingan tersebut untuk meneruskan usahanya.

Praktek kolusi dalam novel *Kremil* terjadi pada penghuni lokalisasi pejabat kotamadya. Praktek kolusi sebagai upaya bentuk penyuapan terjadi antara kedua belah pihak yang bekerja sama secara ilegal. Seperti yang terjadi dalam novel *Kremil*. Praktek kolusi antara pejabat daerah tata kota dengan warga *Kremil*. Tokoh Prali dan Sholeh ketika itu akan mengadakan peninjauan lokalisasi *Kremil* yang rencananya akan dijadikan daerah perkotaan. Pak camat, pak lurah serta para mucikari beserta anak semangnya ketakutan kehilangan lahan *Kremil* yang selama ini mereka tempati untuk hidup. Sebagai upaya untuk merayu pejabat tersebut maka para penghuni *Kremil* mengadakan upacara penyambutan khusus untuk tamu-tamu pemerintah, diantaranya dengan menyuguhkan makanan dan minuman yang enak-enak lengkap dengan pelayanan dari anak semang mucikari yang tercantik. Usaha itupun berhasil, *Kremil* tidak jadi digusur dan mereka bisa tetap hidup di lokalisasi *Kremil*.

Bukti-bukti bahwa praktek kolusi ini biasa dilakukan oleh pejabat yang berwenag seperti pejabat daerah. Kolusi antara dua pihak tersebut akan memberikan keuntungan tersendiri, baik dari pejabatnya ataupun dari pihak mereka yang berkepentingan. Karena dengan demikian praktek kolusi ini sulit untuk diberantas. Seperti yang terdapat dalam kutipan berikut ini:

“Camat dan lurah diberitahu dan diajak ikut serta, karena mereka yang tahu lokasi dan kemajuan daerahnya. Tidak disangkanya kunjungan kerja dinas itu dimanfaatkan sebagai kunjungan pesta pora, disambut dengan sambutan para penghuninya kompleks dan pidato-pidato.” (Brata:39).

“Mengapa lurah dan Camat, memerintahkan sambutan begitu resmi?”

“Mungkin usaha mempengaruhi pejabat kotamadya agar tempat ini jangan ditutup. Jangan digusur oleh pemerintah. Mereka akan kehilangan lahan tempat mencari nafkah?”

“Mereka siapa?”

“Ya para mucikari, penghuni, tukang becak. Banyak orang.” (Brata:40).

“Lalu apa rencana pemerintah tentang tempat ini? Bukankah tempat ini segera digusur?” Tanya Basuki perlahan kepada pejabat tata kota.

“Belum ada rencana apa-apa. Walikota masih mencurahkan perhatiannya untuk membenahi kampung kumuh di dalam kota.” (Brata:33).

Kutipan diatas menunjukkan adanya praktek kolusi, yaitu bentuk penyuapan terhadap pejabat kotamadya, sebagai upaya untuk merayu pemerintah kotamadya untuk tidak menggusur lahan mereka. Bukti adanya campur tangan pejabat terhadap keberadaan lokasi *Kremil*.

Dalam kehidupan nyata banyaknya orang ingin bekerja sebagai pegawai negeri, mereka rela untuk bisa diterima sebagai pegawai negeri meskipun harus membayar uang dalam jumlah yang besar. Alasan mereka bekerja sebagai pegawai negeri merupakan jaminan hidup sejahtera seumur hidup. Pekerjaan tidak terlalu padat dan banyak objek-objek yang berarti menambah pemasukan untuk kantong pribadi. Minat masyarakat untuk menjadi pegawai negeri tiap tahunnya mengalami pelonjakan, bahkan mereka yang sudah membayar belum tentu diterima apabila kalah dalam memberikan uang suapan dengan calon-calon

pegawai negeri lainnya. Ini merupakan bukti bahwa suap-menyuap atau yang disebut kolusi menjadi bagian dari kehidupan. Apalagi yang melibatkan birokrasi pemerintah.

Suatu fenomena yang terjadi dimasyarakat saat ini bahwa suap menyuap wajib hukumnya apabila kita ingin mengurus sesuatu yang melibatkan birokrasi pemerintahan. Seperti pada saat kita mengurus SIM atau KTP. Semua harus melalui prosedur yang rumit dan lama. Tetapi keadaan seperti itu bisa diatasi apabila kita memberikan “uang tambahan” sebagai pelicin supaya urusan kita cepat selesai. Alasan mereka uang pelicin itu sebagai biaya untuk tenaga mereka dalam menyelesaikan tugas. Padahal selama ini pemerintah telah menganggarkan dana untuk gaji pegawai birokrasi, lalu sebenarnya untuk apa uang tambahan tersebut kalau bukan untuk kepentingan pribadi mereka. Apabila kita tidak mau memberikan uang tambahan kepada pengurus, mustahil surat-surat yang kita urus akan selesai. Sudah menjadi rahasia umum kalau sistem birokrasi Indonesia sangat rumit, bertele-tele dan sangat komersil.

Pemberian hadiah atau suap menyuap yang dikaitkan dengan perilaku birokrasi didalam masyarakat kita merupakan sarana yang tepat untuk terjadinya preaktek KKN, Hadiah dan suap hidup berdampingan di sepanjang sejarah. Memberi hadiah bukanlah sumber korupsi besar-besaran walaupun hadiah dapat dengan mudah diselewengkan menjadi suapan. Mereka memberi suapan tidak didasari oleh perasaan yang mendorong pemberian hadiah tetapi lebih ke bentuk penyusunan.

Dalam kehidupan nyata, hal seperti ini dapat saja terjadi disegala segi kehidupan. Termasuk pada lembaga pendidikan. Kolusi terus merajalela dan meluas sampai ke sekolah-sekolah, Perguruan Tinggi, dan pengadilan. Sejak usia muda, para murid sekolah sudah diperkenalkan pada praktek kolusi. Para kepala sekolah biasanya memilih anak-anak dari orang-orang yang dapat memberi bantuan atau keuntungan untuk sekolah tersebut, disamping yang dapat membayar. Anak-anak orang kaya di setiap kelas dipertahankan dan mereka diperlukan untuk menghimpun dana. Hal ini juga berlaku apabila ada anak-anak yang gagal dalam ujian akhir tahun ajaran, mereka dinaikkan oleh kepala sekolah mereka asalkan mampu membayar uang lebih.

Pendaftaran ke universitas juga penuh dengan liku-liku yang kotor. Delapan puluh persen mahasiswa yang diterima adalah karena kepandaian mereka dan sisanya diperuntukkan bagi anak-anak orang kaya yang mampu membayar mahal untuk bisa diterima diperguruan negeri favorit, serta jatah bagi anak-anak dosen. Keadaan ini semakin parah dengan diberlakukannya otonomi kampus baru-baru ini. Otonomi kampus berarti tiadanya subsidi pemerintah ke lembaga perguruan tinggi. Maka dengan demikian biaya yang ditanggung oleh calon mahasiswa baru benar-benar mahal. Seleksi masuk ke perguruan tinggi menjadi kacau. Karena sistem yang mereka tawarkan adalah menjual kursi kepada calon mahasiswa dengan harga mahal. Hanya anak orang kaya saja yang mampu meneruskan pendidikan tinggi. Otomatis pendidikan seakan-akan diperuntukkan bagi orang yang mampu saja.



Contoh praktek kolusi lain yang terjadi di dunia perpolitikan Indonesia, yaitu kasus yang menimpa Soeharto dalam melakukan korupsi belum mendapat tanggapan dari pemerintah secara tegas. Buktinya hukum tidak mampu memenjarakan mantan penguasa orde baru tersebut. Alasan yang selama ini diberitakan karena menyangkut kesehatan Soeharto. Hingga sekarang ini Soeharto hidup bebas dan kasusnya berhenti sampai disini. Bukti bahwa hukum peradilan Indonesia bisa dibeli dengan uang. Penegak hukum menerima suap oleh penguasa, kolusi telah terjadi didunia hukum Indonesia. Siapa yang memiliki uang maka ia akan selamat. Seperti itulah gambaran kolusi yang terjadi di Indonesia.

Kritik sosial terhadap pejabat terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi didalamnya merupakan keharusan. Seorang pejabat seharusnya selalu menjadi contoh yang baik bagi orang lain dan juga bagi masyarakat. Akan tetapi, dalam kenyataannya ada juga pejabat yang tidak bisa dijadikan contoh. Melalui tokoh Prali dan Sholeh, misalnya, sebagai seorang pejabat mereka justru mempergunakan jabatan dan kekayaan mereka untuk hal-hal yang kurang baik, misalnya, dengan memiliki simpanan, menganggap sepele lembaga perkawinan, mengabaikan nilai-nilai moral, melakukan penggelapan dana serta melakukan kolusi untuk kesenangan pribadi. Sebagai seorang pejabat, tokoh Prali dan Sholeh tidak dapat dijadikan suri tauladan yang baik.

“Basuki terheran-heran akan tingkah kelakuan para pejabat itu. Terutama tentang Sholeh Putranto. Ia ini sudah berumah tangga, punya rumah dan istri. Mengapa masih juga butuh pelukan Arni? Apa yang dibisikkan pada istrinya dan apa pula yang dibisikkan pada Arni, ketika dia berhubungan intim dengan perempuan-perempuan itu?” (Brata:49).

“Kisah para pejabat teman karibnya, kisah Sholeh dan Prali, betapapun mengukir jiwanya secara mengejutkan. Sebagai kepala keluarga orang baik-baik, Basuki merasa teman-temannya itu berbuat culas. Culas yang mendalam. Mereka itu berbuat culas terhadap keluarganya. Bagi Sholeh terutama terhadap istrinya, bagi Prali terutama terhadap calon istrinya. Terhadap perempuan pasangannya mereka. Basuki tidak dapat menggambarkan betapa luka hati perempuan pasangan mereka, apabila tahu perilaku kehidupan seks laki-laki semacam Sholeh dan Prali itu begitu dihamburkan kepada perempuan lain....Teman-temannya itu sudah berbuat tidak adil terhadap perempuan pasangan resminya”. (Brata:60-61).

Kritik pengarang terhadap pejabat ini tampaknya bertujuan sebagai kontrol sosial bagi semua pejabat yang sedang mengemban tugas saat ini dan masa yang akan datang. Para pejabat hendaknya dapat dijadikan suri tauladan bagi masyarakat. Seorang pejabat hendaknya tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma sosial. Kekayaan yang dimiliki oleh pejabat hendaknya dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak dipergunakan untuk hal-hal yang negatif sebagaimana yang dilakukan oleh tokoh Prali dan Sholeh.

Peran serta pihak-pihak tertentu dalam maraknya praktek pelacuran juga terdapat dalam novel *Kremil*. Dengan memanfaatkan statusnya sebagai seorang polisi, tokoh Leo Pastora mempunyai simpanan di *Kremil* dan membuka usaha rumah bordir.

“Hubungan keakraban dengan Tante Henny renggang karena Sutini mengandung. Mengandung bayi Leo, setelah sepuluh tahun tinggal serumah dengan keluarga polisi itu. Sama sekali tidak terduga oleh mereka bertiga. Selain mereka bergaul lama, umur Sutini dan Leo berbeda enam belas tahun. Secara manusiawi, sebenarnya Tante Henny bisa juga menerima bayi Leo dan Sutini di tengah keluarga mereka. Karena Tante Henny juga tidak punya anak.”(Brata:410-411).

“Setelah berbagai usaha penempatan dicoba, dan memakan waktu beberapa bulan yang merepotkan, akhirnya Tinny ditempatkan di *Kremil*. Di sana disuruh membuka rumah bordil seperti yang lazim diusahakan di kompleks itu.” (Brata:412).

Skandal cinta Leo dengan Sutini (Tinny) menghasilkan seorang bayi, tetapi karena tidak ingin reputasinya hancur dan diketahui oleh pihak gereja terlebih lagi oleh dinas tempat Leo bekerja, maka ia membuatkan Tinny sebuah rumah di kawasan *Kremil* dan berkembang menjadi rumah bordir. Dalam kenyatannya pelacuran-pelacuran di Indonesia banyak yang mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang berkuasa. Seperti yang dilakukan oleh Kapten Leo Pastora terhadap rumah bordil Bu Tinny. Pak Leo memberi perlindungan kepada Bu Tinny dan anak-anak semangnya dengan melakukan kunjungan rutin ke tempat Bu Tinny. Kunjungan-kunjungan ini juga sebagai sarana komunikasi dengan seluruh penghuni rumah bordil Bu Tinny serta mendiskusikan persoalan yang dihadapi masing-masing penghuni rumah bordir.

“Siang itu seluruh penghuni rumah Bu Tinny berkumpul di ruangan kedai. Seperti rapat lengkap suatu kelompok kerja. Meskipun tanpa rencana dan tanpa undangan, tiap orang merasa berkewajiban hadir dalam pertemuan itu. Kepentingan ikatan yang pokok adalah kunjungan Pak Leo Pastora, laki-laki yang disebut-sebut sebagai pemilik rumah, atau ‘suami’ Bu Tinny, atau yang melatar belakangi kekuasaan Bu Tinny.” (Brata:420).

Selain Pak Leo yang memiliki rumah bordir di *Kremil*, ada juga Pak Jlantik yang berprofesi sebagai polisi memiliki rumah bordir di *Kremil*. Keberadaan polisi-polisi ini sebagai pemilik salah satu rumah bordir di *Kremil* menunjukkan bahwa adanya perlindungan dari pihak yang berkuasa sehingga *Kremil* dapat dipertahankan.

“Pardi mengajak ke rumah Pak Jlantik dan Pak Maruto, polisi dan Pak RT.

“Sebentar kemudian datang Polisi Jlantik dan ketua RT Maruto yang dijemput oleh Pardi. Kebetulan Polisi I Made Jlantik juga sedang di rumah, tidak tugas dinas.” (Brata:568-569).

Tidak menutup kemungkinan pelacuran dipertahankan karena dinilai memberikan kontribusi yang lumayan besar kepada pemerintah kota. Keterlibatan polisi dan pemerintah mempunyai andil besar dalam dunia pelacuran di Indonesia. Lokalisasi *Kremil* sangat membantu pemerintah melalui penghasilan pajak. *Kremil* merupakan sumber devisa bagi pemerintah. Praktek kolusi terjadi antara pengelola pelacuran dengan pihak berwajib. Oleh karena itu, mustahil kiranya untuk mengapus pelacuran, apabila praktek kolusi tetap saja berlangsung.

Korupsi Kolusi dan Nepotisme memang merupakan masalah yang sangat kronis di Indonesia. KKN bukan lagi sekadar kasus, tetapi sudah merasuk dalam sistem, bahkan nampak bergerak sebagai sistem itu sendiri. Rasanya hampir setiap unsur yang ada di dalam sistem telah terlibat dalam proses pembiakannya, sehingga yang terlihat adalah upaya berbagai pihak untuk saling memanfaatkan dan saling melindungi.

Untuk membersihkan sistem dari KKN dan penyakit lainnya diperlukan hadirnya kekuatan yang solid, tetapi karena tidak adanya kekuatan besar yang solid, yang memiliki kemauan dan kekuatan yang cukup untuk membongkar sistem. Indonesia yang tidak juga kunjung berbenah. Bahkan ketika jaman sudah berubah pun, Indonesia tertinggal dalam masalah penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Pada dasarnya kemiskinan, pelacuran, dan KKN, saling berkaitan satu sama lain. Ketiganya saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Sehingga mustahil apabila kita mengapus pelacuran apabila faktor kemiskinan masih menjerat bangsa Indonesia, sehingga dengan demikian praktek KKN akan terus saja terjadi. Kritik-kritik sosial yang dikemukakan oleh pengarang melalui novel *Kremil* ini menunjukkan adanya berbagai penyimpangan dalam masyarakat. Kritik sosial ini sekaligus juga dapat berfungsi sebagai kontrol sosial, setidaknya hal-hal yang dikritik oleh pengarang tersebut dapat diperbaiki.

# **BAB V**

## **SIMPULAN**